

ANALISIS PANDANGAN POLITIK DAN SOSIAL Ir. SOEKARNO DALAM BUKU INDONESIA MENGGUGAT

Dwi Andika

andikadwi483@yahoo.co.id

**Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
STKIP PGRI Jombang**

Abstract

Political and state figures such as Ir. Soekarno is often forgotten by the current generation, so researchers want to reinstate the political administration of Ir. Soekarno. Researchers feel the political and social suffering during the reign of Ir. Soekarno after reading the book *Indonesia Sues*, so the researchers raised the title of this research in more depth. Based on this, it can be formulated that how to analyze the political and social views of Ir. Soekarno in the book *Indonesia Sues*.

This study aims to describe and analyze the political and social views of Ir. Soekarno in the book *Indonesia Sues*. At the level of benefits, this research is useful for historians, academics, politicians, and social observers in reexamining the political and social views of Ir. Soekarno in the book *Indonesia Sues*.

This research method uses a literature study approach, which looks literally through various library sources including books, internet, e-books, journals, and so on with analytical descriptive analysis techniques. At the discussion level, this study examines and analyzes (1) the thinking of Ir. Soekarno in the Pre-Colonial Era and Colonialism, in general about revolutionary ideas and ideas, and other thoughts against the era of colonialism and Dutch East Indies imperialism; (2) Anomalies of Ir. Soekarno The Political Context of the Indonesian State Administration, an outline was discussed regarding the Dutch controversy in arresting Ir. Soekarno and other deviations and oppressions; (3) Ideological and Political Views of Ir. Soekarno State and Government Context, in relation to the ideological thinking of the state and state politics, Ir. Soekarno; (4) Views of Pancasila and Socialism, Ir. Soekarno The Context of People's Power and Sovereignty, on this subject discussed several views of Pancasila in the social relation of the constitutional state of Ir. Soekarno in the era of Colonialism and Imperialism. In addition, it also discussed the principles of Marhainism at the level of Socio-Nationalism, Ir. Soekarno during his reign.

In the end, the researcher concludes that it is important to provide knowledge and understanding of the history of the struggle of the Indonesian nation during the Era of Ir. Soekarno, who could see from a political and social point of view, the need for the same fate and mutual cooperation in fighting colonialism and Dutch East Indies imperialism for Indonesian independence by means of the movements of community organizations at that time.

Keywords: Political Views, Social Views, Ir. Soekarno: *Indonesia Sue*

Abstrak

Tokoh politik dan kenegaraan seperti Ir. Soekarno seringkali dilupakan oleh generasi sekarang, sehingga peneliti ingin mengangkat kembali secara politik ketatanegaraan dan pemerintahan Ir. Soekarno. Peneliti merasakan penderitaan politik dan sosial pada masa pemerintahan Ir. Soekarno setelah membaca buku *Indonesia Menggugat*, sehingga secara lebih mendalam peneliti mengangkat judul penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dirumuskan bahwa Bagaimana analisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku *Indonesia Menggugat*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku *Indonesia Menggugat*. Pada tataran manfaat, maka penelitian ini bermanfaat bagi Sejarawan, Akademisi, Politikus, dan Pengamat Sosial dalam menelaah kembali pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku *Indonesia Menggugat*.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan, di mana melihat secara literasi melalui berbagai sumber pustaka baik Buku, Internet, *E-Book*, Journal, dan sebagainya dengan teknik analisis yakni deskriptif analitik. Pada tataran pembahasan, penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang (1) Pemikiran Ir. Soekarno Era Pra Kolonial dan Kolonialisme, secara garis besar tentang ide dan gagasan revolusioner, dan pemikiran lainnya dalam melawan era kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda; (2) Anomali-anomali Ir. Soekarno Konteks Politik Ketatanegaraan Indonesia, secara garis besar dibahas mengenai kontroversi Belanda dalam menangkap Ir. Soekarno dan penyimpangan-penyimpangan serta penindasan lainnya; (3) Pandangan Ideologi dan Politik Ir. Soekarno Konteks Kenegaraan dan Pemerintahan, kaitannya dengan pemikiran ideologi negara dan politik kenegaraan Ir. Soekarno; (4) Pandangan Pancasila dan Sosialisme Ir. Soekarno Konteks Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat, pada pokok bahasan ini dibahas beberapa Pandangan Pancasila dalam kaitan sosial ketatanegaraan Ir. Soekarno era Kolonialisme dan Imperialisme. Selain itu dibahas juga prinsip Marhainisme pada tataran Sosio-Nasionalisme Ir. Soekarno pada masa pemerintahannya.

Pada akhirnya peneliti memberikan kesimpulan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada Era Ir. Soekarno, di mana bisa melihat dari pandangan politik dan sosial, perlunya senasib sepenanggungan dan kegotongroyongan dalam melawan Kolonialisme dan Imperialisme Hindia Belanda untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara melalui pergerakan-pergerakan organisasi masyarakat di masa itu.

Kata Kunci : Pandangan Politik, Pandangan Sosial, Ir. Soekarno: *Indonesia Menggugat*.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sudah mengetahui Tokoh Bapak Bangsa sebagai salah satu manifestasi dari awal penjajahan kolonial belanda sampai dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Awal melakukan revolusi kemerdekaan Indonesia sebenarnya digagas oleh Ir. Soekarno mulai jaman pergerakan 1926. Salah satu bentuk gerakannya bertujuan mempersatukan elemen masyarakat Indonesia yang dominan dalam arah perjuangan melawan penjajah. Elemen masyarakat itu tidak lain adalah Nasionalis, Islamis serta Marxsis. Ir. Soekarno menggagas persatuan dan kesatuan pada setiap visi dan misi tiga elemen tersebut serta menarik benang merah terkait proses perjuangan yang memiliki kesamaan tujuan. Harapannya akan menjadi sebuah api gelombang revolusi yang besar jika ketiga elemen ini bersatu (Soekarno, 1963:11-22).

Kedudukan Ir. Soekarno dalam hal ini cukup jelas, bahwa ia memaknai nasionalis tidak sekedar sikap mencintai tanah air atau bangsa. Satu hal yang paling penting untuk memahami nasionalisme Indonesia versi Soekarno adalah cara ia melakukan konstruksi gagasan itu. Cara pandang Soekarno yang menggunakan perspektif dialektika dalam merumuskan nasionalisme Indonesia merupakan unsur penting yang justru membuat konstruksi gagasannya berbeda secara signifikan dari pemahaman konvensional yang sering mengambil bentuk ekspresi yang sekedar bermakna cinta tanah air. Satu hal yang pasti adalah bahwa Soekarno menolak ide nasionalisme Indonesia yang timbul karena sekedar ekspresi sentimental atau perasaan. Di sisi lain, sekalipun secara populer Ir. Soekarno sering melontarkan wacana politik tentang nasionalisme Indonesia secara umum, namun secara konsepsional Ir. Soekarno memformulasikannya sebagai sosio-nasionalisme.

Gerakan nasionalis yang dibangun dengan gagasan Ir. Soekarno juga melibatkan aspek Islamis, karena gagasan-gagasan ideologis kaum muslimin yang bersifat khusus ini tidak berdiri sendiri, di sisi lain lahir gagasan ideologi sosialis sebagai alat yang memberikan semangat masyarakat kecil dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Terakhir adalah nasionalisme kaum priyayi yang melandasi bangkitnya sentimen etnik. Ir. Soekarno berhasil mengawinkan ketiga ideologi perlawanan yang semula berjalan sendiri-sendiri ini untuk bersatu menjadi spirit kebangsaan. Spirit kebangsaan itu melahirkan konsep negara nasionalistik yang berciri pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, integralisme negara (NKRI), dan sistem demokrasi dalam kepemimpinan, hingga sekarang (Umar: 2002).

Agama dan nasionalisme perlu disejajarkan kedudukannya sebab keduanya secara politik sangat penting dalam memperkuat kehidupan bernegara, karena itu tidak salah jika dikatakan Indonesia dibentuk sebagai negara yang dijiwai oleh agama-agama dan nasionalis. Berbeda dengan pandangan marxsis Ir. Soekarno, sudah tentu menerapkan egalitarian dalam memanfaatkan sistem pemerintahannya, sehingga tidak ada kesatuan sosial dan nasional yang integralistik.

Melihat pandangan Ir. Soekarno, tentang aspek nasionalis, islamis dan marxsis ini bertujuan untuk membentuk suatu negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan dan berkesejahteraan, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pandangan ini tidak sejalan ketika era politik kolonialisme dan imperialisme pada masa penjajahan Ir. Soekarno. Pada tanggal 17 Mei 1956 Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. "*Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme,*" inilah Pidato Ir. Soekarno, selain itu Ir. Soekarno juga menyatakan "*telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad, tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai*". Selanjutnya juga mengatakan "*Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?*" sehingga inilah perkataan Ir. Soekarno di depan para pendengarnya.

Indonesia menggugat merupakan sebuah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno saat persidangan di Landraad, Bandung tahun 1930. Soekarno beserta ketiga rekannya, Maskun, Gatot Mangkupraja dan juga Supriadinata yang bergabung dengan PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia dituduh akan menggulingkan kekuasaan Belanda. Pada saat Soekarno dipenjara, ia menyusun dan juga menulis pidato Indonesia Menggugat. Pidato tersebut berisi mengenai bagaimana keadaan politik internasional dan juga kerusakan masyarakat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Indonesia Menggugat ini kemudian menjadi salah satu dokumen politik yang menentang kolonialisme dan juga imperialisme.

Menarik untuk diteliti bahwa meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat. Ir. Soekarno mendapatkan sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS), namun, lebih menarik lagi, karena pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Ir. Soekarno. Sebagaimana masyarakat Indonesia tahu, bahwa kuatnya semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Hal ini dapat dikatakan bahwa sikap antikolonialisme dan anti-imperialisme Ir. Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikirannya waktu muda (Soekarno: Departemen Penerangan RI).

Pemikiran-pemikiran dan pandangan Ir. Soekarno tentu membawa efek domino ketika beliau menuliskan buku Indonesia Menggugat. Sekilas tentang pemikiran Ir. Soekarno adalah berpandangan pada ide dan gagasan nasionalisme dengan politik dalam negeri yang anti kolonialisme dan anti imperialisme. Pandangan ini juga menurut pandangan peneliti, sesungguhnya Ir. Soekarno memang tidak memberikan batasan anti-kolonialisme dan anti imperialism, karena pada saat itu Ir. Soekarno juga melakukan kerjasama dalam politik luar negeri terhadap bangsa kolonial dan imperialisme untuk memberikan kerukunan sosial dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kerjasama itu kuat ketika Ir. Soekarno memberikan peluang untuk melakukan hubungan diplomatic antara Jepang, Belanda dan Indonesia dalam memperkuat persenjataan militer di Indonesia pada era kolonial. Untuk itu Ir. Soekarno memberikan ruang bagi kolonial dan imperialisme untuk mendukung Indonesia. Inilah menjadi menarik dan melatarbelakangi akan peneliti mengangkat penelitian ini yang berkaitan dengan yang ditulis Ir. Soekarno pada Indonesia Menggugat.

Pada aspek di atas itulah, peneliti menaruh harapan untuk melakukan penelitian ini dengan mengkaji secara lebih dalam tentang pandangan politik dan sosial seperti apa Ir. Soekarno pada tulisan "*Ir. Soekarno : Indonesia Menggugat*" sehingga pada akhirnya membuka wawasan bagi masyarakat dan bisa peneliti lainnya ketika kepentingan politik mempengaruhi kekuasaan dan kekuasaan mempengaruhi kondisi serta dinamika sosial masyarakatnya, sebagaimana pendapat dari Arif Budiman (Budiman:1996).

Penelitian membatasi pada ruang lingkup beberapa pemikiran dan aspek kajian yang meliputi: (1) kajian tentang pandangan Ir. Soekarno dalam buku "Indonesia Menggugat" terutama dikaji pada pandangan dan aspek politik maupun sosial, dan (2) menjadi objek penelitian pada tataran rujukan yang mengacu pada buku Ir. Soekarno: "Indonesia Menggugat".

B. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini memberikan fokus kajian analisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku Indonesia Menggugat. Hal ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku "Indonesia Menggugat". Tidak hanya itu bahwa nantinya akan mempengaruhi seberapa besar pandangan politik dan sosial itu pada dinamika masyarakat maupun pemerintahan.

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Pemikiran Ir. Soekarno dalam Buku “Indonesia Menggugat”.

Pada kajian ini didasarkan atas pemikiran secara filsafati yang berkaitan dengan adanya pledoi yang dibacakan oleh Bung Karno di hadapan Pengadilan Landraad Bandung pada tahun 1930 merupakan dokumen fenomenal yang menjadi inspirasi bagi kaum pergerakan di masanya. Pledoi yang begitu menggemparkan tersebut diberi judul, “Indonesia Menggugat!” Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *Indonesia Accuses*, atau *Indonesie klaagt aan* dalam bahasa Belanda.

Indonesia menggugat merupakan sebuah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno saat persidangan di Landraad, Bandung tahun 1930. Soekarno beserta ketiga rekannya, Maskun, Gatot Mangkupraja dan juga Supriadinata yang bergabung dengan PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia dituduh akan menggulingkan kekuasaan Belanda. Pada saat Soekarno dipenjara, ia menyusun dan juga menulis pidato Indonesia Menggugat. Pidato tersebut berisi mengenai bagaimana keadaan politik internasional dan juga kerusakan masyarakat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Indonesia Menggugat ini kemudian menjadi salah satu dokumen politik yang menentang kolonialisme dan juga imperialisme.

Pengadilan yang menyeret nama Bung Karno dan Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja dan Supriadinata tersebut terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 1930. Berdasarkan keterangan yang ditulis Her Suganda dalam bukunya *Jejak Soekarno di Bandung*, keempatnya didakwa telah melanggar pasal 153 bis, 169, dan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda.

Telah banyak penelitian sejarah yang menjadikan pledoi tersebut sebagai bahan kajian, misalkan kajian Roger G. Paget yang mengedit, menerjemahkan, dan menyusun anotasi atas dokumen tersebut yang diterbitkan dengan judul, “*Indonesia Accuses! Soekarno’s defence oration in the political trial of 1930*” (Kuala Lumpur; New York: Oxford University Press, 1975), Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1974), maupun kajian tentang Soekarno Muda yang dilakukan oleh Peter Kasenda, *Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933* (Peter, 2010).

Beberapa hal yang perlu dikaji pada kajian ini antara lain: (1) Historis Ir. Soekarno dan Pemikirannya; (2) Peradilan Politik dan Hukum Ir. Soekarno; (3) Mengkritik Kapitalisme dan Imperialisme.

a. Historical Ir. Soekarno dan Pemikirannya.

Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Saat Soekarno lahir diberi nama Kusno Sosro Karno. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo, orang Jawa dan bekerja sebagai mantri guru di Sekolah Rakyat di Singaraja, Bali. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, wanita keturunan bangsawan Bali (berasal dari Kasta Brahma) asal Buleleng, Bali. Darah biru mengalir di tubuh Soekarno, ayahnya keturunan sultan Kediri sedangkan ibunya keponakan raja terakhir dari Singaraja (Sudjatmiko, 2010:01).

Soekarno kecil sering sakit-sakitan, hal itu terlihat bahwa dulu ia sering terserang penyakit disentri dan malaria. Hal tersebut membuat ayahnya berpikir untuk mengganti nama Kusno menjadi Karno. Alasan ayahnya mengubah menjadi Karno, di samping agar tidak sakit-sakitan, adalah ayahnya sangat mengagumi sosok Karno, salah satu tokoh pewayangan dalam cerita Mahabharata yang digambarkan sebagai pahlawan besar dalam cerita klasik Hindhu tersebut. Soekarno juga tokoh yang setia kawan, memiliki keyakinan yang kuat, berani dan sakti.

Soekarno dibesarkan ditengah-tengah keluarga miskin, tetapi hal itu tidak menjadikannya sebuah mimpi buruk dalam kehidupan masa kecil Soekarno. Hal itu dikisahkan pada malam lebaran semua teman-temannya bermain petasan, tetapi

Soekarno kecil hanya bisa berbaring di tempat tidurnya yang kecil. Hatinya sedih karena ia tidak dapat bersuka ria bersama teman-temannya, dikarenakan kondisi dan keadaan keluarganya yang serba kekurangan secara materi.

Soekarno juga memiliki eksistensi yang kuat, terbukti di saat bermain bersama teman-temannya, ia selalu menjadi pemimpin dalam permainannya tersebut. Ketika ia sudah mulai masuk dalam HBS (*Hoogere Burger School*), setelah ia lulus dari sekolah Bumiputera. Kemudian ia dititipkan ayahnya kepada seorang teman yang dapat merubah pemikiran dan tindakannya (Soyomukti. 2009:59). Pendiri SI (Sarekat Islam) yaitu HOS. Cokroaminoto di Surabaya. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno tinggal selama di Surabaya.

Sebagaimana diakuinya, bahwa Pak Cokro panggilan Karno untuk Cokroaminoto adalah orang yang mampu mengubah hidup dan dunianya (Soekarno, 1966:41). Menurut Soekarno, Pak Cokro adalah seseorang yang pandai berpidato, kharismatik dan berwawasan luas. Dia selalu mendengarkan diskusi Pak Cokro dan tamu-tamunya, termasuk kalangan kiri (komunis) seperti Alimin dan Muso yang kelak menjadi pendiri PKI (Partai Komunis Indonesia). Hal itu digunakan sebagai sandaran Bung Karno untuk mengarahkan pembangunan Indonesia.

Pada awal kepemimpinan Ir. Soekarno membangun Indonesia, Soekarno dalam mengantarkan Indonesia merdeka memiliki dua strategi yang cukup baik. Pertama dengan cara membangun kesiapan mental bangsa Indonesia dan yang kedua dengan cara menangkap peluang untuk merdeka (Kandito, 2011:43). Cara yang pertama dengan membangun kesiapan mental bangsa tidaklah mudah, karena proses transformasi dari negeri yang terjajah menjadi negeri merdeka, tentunya melalui tahapan-tahapan yang panjang serta upaya-upaya yang luar biasa.

Awalnya Soekarno melakukannya dengan mendekati lingkungan terdekat yaitu organisasinya, Soekarno tidak segan-segan membantu kawan-kawan organisasinya dalam berbagi masalah serta selalu memberikan solusi yang solutif, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kawan-kawannya. Kemudian Soekarno mulai mencoba mengubah pola pikir rakyatnya yang semula berorientasi ke arah pemerintahan Jepang menuju pandangan Indonesia merdeka. Hal itu dilakukan dengan cara orasi dalam berbagai kesempatan. Tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat membekas dalam jiwa para pendengarnya. Setelah itu, Soekarno tidak lupa berdiskusi dengan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pengaruh, baik dari kalangan sesama pejuang ataupun dari kalangan Jepang dan Sekutu, termasuk bertemu dengan rakyat secara periodik.

Hal itu semua dilakukan Soekarno untuk membangun mental bangsa agar menjadi bangsa yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Setelah membentuk mental bangsa yang diharapkan semua kalangan rakyat Indonesia, strategi yang kedua adalah dengan menangkap peluang untuk merdeka. Salah satu peluang yang utama adalah adanya kekacauan-kekacauan politik dunia, yang menimbulkan pecahnya Perang Dunia II yang juga menyebabkan posisi Jepang melemah di Asia Raya. Kekalahan telak Jepang dirasakan ketika Hiroshima dan Nagasaki diporakporandakan dengan dijatuhi bom atom oleh sekutu.

Kedua strategi tersebut selalu dipergunakan Ir. Soekarno dalam melawan penjajahan, namun pemikiran Soekarno terhadap perlawanan dan pergerakan itu apabila dikaitkan dengan buku *Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat*, adalah pemikiran di mana orientasi ideologi politik Soekarno mulai terbentuk. Pada masa itu, kaum pergerakan mulai berkembang di Bandung yang menjadikan kota itu sebagai pusat alam pemikiran nasionalis sekuler (Kasenda, 2010:18).

Pada masa itu, Surabaya menjadi pusat pergerakan kaum Islam, Semarang menjadi pusat pergerakan kelompok komunis dan Bandung menjadi taman pemikiran kelompok nasionalis. Di Bandung, Soekarno berkenalan dengan tokoh nasionalis

sekuler seperti E.F.E Douwes Dekker, dr. Tjiptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Yang tidak kalah penting adalah pertemuan Soekarno dengan Kang Marhaen, seorang petani di Selatan Bandung. Pada suatu ketika, Soekarno yang pada masa itu berusia 20 tahun sedang bersepeda ke bagian selatan Kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat penduduk dan setiap petani memiliki tanah kurang dari satu hektar (Adams, 1984:49-51; Kasenda, 2010:49). Marhaen itulah yang kemudian dijadikan oleh Soekarno sebagai representasi dari kaum lemah, sengsara, dan tertindas akibat kekejaman kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Soekarno sebenarnya sempat kembali ke Surabaya untuk membantu keluarga Tjokroaminoto. Ketika mereka harus kehilangan Tjokroaminoto karena dipenjara oleh Belanda setelah peristiwa SI Afdeeling B di Garut. Soekarno kembali ke Bandung setelah menceraikan Oetari, putri Tjokroaminoto dan kemudian menikahi Inggit Garnasih, ibu kosnya waktu di Bandung dahulu. Pada masa itu Soekarno semakin aktif dalam dunia pergerakan. Pada tahun 1926 ia mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari *Indonesische Studie Club* oleh dr. Soetomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927.

b. Peradilan Politik dan Hukum Ir. Soekarno.

Pergerakan Soekarno semakin memberikan pengaruh terhadap kalangan pejuang kemerdekaan yang sedang mulai melakukan konsolidasi seperti dengan mengadakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dua bulan setelah Sumpah Pemuda, Soekarno berhasil memperluas pengaruhnya kepada berbagai kelompok pejuang kemerdekaan pada masa itu untuk mendirikan federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang disingkat PPPKI. Dengan dibentuknya federasi itu, mulailah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengawasan yang tak kenal ampun terhadap P.N.I. dan P.P.P.K.I.

Pengaruh dari agitasi yang dilakukan Soekarno sanggup menggerakkan rakyat banyak merupakan ancaman nyata bagi Belanda. Apalagi apabila Soekarno yang berpidato, rakyat berkumpul seperti semut. Soekarno ditakuti karena daya hasutnya yang luar biasa. Penguasa kolonial kemudian memerintahkan penangkapan terhadapnya ketika ia sedang bermalam di Jawa Tengah pada bulan Desember 1929. Seorang inspektur dengan 50 pasukan pada malam itu dengan nada yang agak tinggi mengatakan kepada Soekarno, "Atas nama Sri Ratu saya menahan Tuan". Setelah penangkapan itu, Soekarno dan tiga sejawatnya di PNI yaitu Gatot Mangkupraja, Maskoen Soemadiredja dan Supriadinata ditahan di Penjara Banceuy. Di sinilah Soekarno menuliskan pledoi "Indonesia Menggugat".

Soekarno menghabiskan masa-masa di ruang tahanan Blok F, Nomor 5 yang berukuran 1,5 X 2,5 meter dengan setumpuk buku. Buku-buku tersebut ia peroleh dari istrinya Inggit, yang tekun menyelundupkan buku lewat stagen. Penjara memberikan ruang refleksi yang luar biasa bagi Soekarno untuk belajar dan mempersiapkan gagasan baru menuju Indonesia Merdeka. Dari bilik penjara ia berkenalan dengan Marx, membaca Sun Yat Sen, mengutip Albarda, meresume karya Snouck Hugronje. Tidak kurang ada sekira 66 nama tokoh yang dikutip Soekarno dalam Indonesia Menggugat. Sebut saja Anton Menger, August de Wit, Bauer, Boeke, Brailsford, Brooshooff, Clive Day, Colenbrander, Daan van der Zee, de Kat Angelino, Dietrich Schafer, Dijkstra, Duys, Engels, Erskin Childres, Federik Peter Godfried, FG Waller, Gonggijp, Henriette Roland Holsts, Herbert Spencer, HG Wells, Houshofer, Huender, Jaures, John Robert Seeley, dan Jozef Mazzini. Ada juga Jules Harmand, Karl Kautsky, Karl Renner, Kilestra, Koch, Kraemer, Lievegoed, Mac Swiney, Manuel Quezon, Michael Davitt, Multatuli, Mustafa Kamil, Parvus, Peter Maszlow, Pieter

Veth, Raffles, Reinhard, Rouffaer, Rudolf Hilferding, Sandberg, Sarojini Naidu, Schrieke, Scmalhausen, Sister Nivedita, Sneevliet, Stokvis, Treub, Troelstra, van den Bergh van Eysinga, van Gelderen, van Heldingen, van Kol van Lith, dan Vleming.

Soekarno sadar sekali bahwa proses peradilan terhadapnya bukanlah murni persoalan hukum, melainkan peradilan politik. Oleh karena itulah, Soekarno menuliskan sendiri pledoinya dengan meminta pengacaranya, Sastromuljono, S.H. untuk mempersiapkan segi juridisnya. Dalam menghadapi persidangan, Soekarno dan teman-temannya didampingi oleh Suyudi S.H., ketua P.N.I. cabang Jawa Tengah, yaitu tuan rumah di mana mereka ditangkap; Sartono S.H., seorang rekan dari *Algemeene Studieclub* yang lama dan tinggal di Jakarta dan menjadi Wakil Ketua yang mengurus soal keuangan partai; Sastromuljono S.H., seorang kawan dan patriot yang tinggal di Bandung. Para pembela mereka mendampingi Soekarno Cs secara *prodeo*. Hakim yang menangani perkara tersebut adalah Mr. Siegenbeek van Heukelom.

Soekarno dan kawan-kawannya dijerat pasal 153 bis en 169 *Wetboek van Strafrecht* yang mana sering kali digunakan Pemerintah Belanda untuk menjebloskan para pejuang ke penjara melalui proses hukum. Soekarno dan kawan di antara lain Raden Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Supriadinata dijatuhkan vonis bersalah atas beberapa hal yaitu: (1) Dituduh sebagai pengurus dan ikut campur dalam perkumpulan yang dimaksudkan bertindak kejahatan bagi pemerintah Hindia Belanda; (2) Dengan sengaja mengeluarkan perasaan dan tindakan yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah Hindia Belanda.

Tidak berhenti sampai disana. Pemerintah Belanda pun beranggapan bahwa pergerakan Soekarno dengan PNI-nya sekaligus pemahaman Marhaenismenya menjadi suatu bahaya bagi kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda meyakini bahwa PNI merupakan pergerakan politik yang pantas untuk dipukul mundur demi kebaikan bangsa melalui keberlanjutan kekuasaan kolonial.

Pada 18 Agustus 1930, setelah delapan bulan meringkuk dalam tahanan, perkara ini dihadapkan di muka pengadilan. Secara formil Soekarno dituduh melanggar Pasal 169 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menyalahi Pasal 161, 171, dan 153. Itu adalah 'de Haatzaai Artikelen' yaitu pasal-pasal pencegah penyebaran rasa benci. Mereka dituduh "mengambil bagian dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan menjalankan kejahatan di samping juga ada usaha menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan, bahwa: "Seseorang yang kedapatan mengeluarkan perasaan-perasaan kebencian atau permusuhan secara tertulis maupun lisan atau seseorang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan yang menghasut untuk mengadakan pengacauan atau pemberontakan terhadap pemerintah Belanda, dapat dikenakan hukuman setinggi-tingginya tujuh tahun penjara". Pasal-pasal tersebut dikenal pula sebagai pasal karet karena memberikan ruang tafsir subjektif yang sangat luas. Bahkan Soekarno menyebutnya aturan karet yang keliwat karetinya (*aller-ergelijkst elastieke bepaling*).

Soekarno mengawali pledoi Indonesia Menggugat dengan menyampaikan bahwa proses peradilan yang sedang dilakukan terhadapnya adalah sebuah proses politik penguasa kolonial untuk membungkam gerakan nasional yang mulai tumbuh sejak dekade awal abad XX. Di halaman awal pembelaannya Soekarno menuliskan:

"Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik: ia, oleh karenanya, di dalam pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan azas pergerakan kami, dan yang menjadi nyawa fikiran-fikiran dan tindakan-tindakan kami ...".

Selanjutnya Soekarno memaparkan bagaimana peranan "hakim dalam proses politik". Soekarno secara basa-basi menyampaikan bahwa percaya bahwa hakim akan berdiri sama tengah. Ia tahu bahwa hakim-hakim Landraad Bandung tersebut sudah

punya pandangan politik tertentu sebelum menangani perkara yang dikenakan kepadanya. Belum lagi ditambah dengan pemberitaan dari koran-koran yang ada pada masa itu seperti *AID de Preangerbode* dan surat kabar lainnya yang menghasut agar hakim menghukum kelompok Soekarno. Soekarno tidak peduli dengan sikap politik para hakim tersebut. Pembacaan pledoi dijadikannya sebagai panggung untuk memaparkan kemelaratan bangsa Indonesia ulah berkubangnya kolonialisme serta memaparkan apa yang dilakukannya dengan organisasi PNI dan PPPKI.

Proses persidangan terhadap Soekarno cs berlangsung sebanyak 19 kali sidang (Adams, 1984:85). Akhirnya, Gatot Mangkupraja, Maskun, Supriadinata dan Soekarno dijatuhi hukuman. Hukuman Soekarno yang paling berat. Ia dikenakan empat tahun kurungan dalam sel dengan ukuran satu setengah kali dua setengah meter. Perkara tersebut naik banding ke Rand van Justitie, akan tetapi pengadilan tinggi ini tetap berpegang kepada keputusan hukuman. Tidak lama setelah itu mereka dipindahkan ke dalam lingkungan dinding tembok yang tinggi dari penjara Sukamiskin.

Persidangan tersebut tidak saja menggemparkan kaum pergerakan Indonesia, tetapi juga sampai ke Belanda. Kaum oposisi di Belanda mengangkat persoalan peradilan Soekarno sebagai kritik atas kegagalan pemerintah Belanda dalam mengendalikan negara koloninya. Meskipun majelis hakim menggajarnya dengan hukuman 4 tahun penjara. Berkat pembelaannya yang dikenal sebagai “Indonesia Menggugat” dan telah menjadi sasaran protes dan kritik dari ahli hukum di negeri Belanda karena peradilan yang dilakukan tidak berdasar dan semua tuduhan tak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan. Atas berbagai protes itulah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengubah masa hukuman BK menjadi dua tahun. Pada akhirnya di hari terakhir sebelum tahun 1932, yaitu pada 31 Desember 1931, dibebaskan.

c. Mengkritik Kapitalisme dan Imperialisme.

Pada substansi pledoinya tersebut, Soekarno mengupas persoalan kapitalisme dan imperialisme yang telah menjadi persoalan berabad-abad di kepulauan Indonesia. Ia memberi pengertian atas imperialisme sebagai:

“Suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, - suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapak perang, tak usah berupa “perluasan negeri daerah dengan kekerasan senjata” sebagaimana yang diartikan oleh Van Kol, tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan “putar lidah” atau cara “halus-halusan” saja, bisa juga dengan berjalan dengan cara “*penetration pacifique*” (Soekarno, 1930:16-7).

Nafsu akan rezeki itulah yang telah menjadi kunci utama bagi berabad-abad penindasan terhadap orang pribumi. Di hadapan persidangan, Soekarno menyampaikan: Nafsu akan rezeki, tuan-tuan hakim, nafsu akan rezekilah jang menjadi pendorong Columbus menempuh Samudera Atlantik jang luas itu; nafsu akan rezekilah jang menjuruh Bartholomeus Diaz dan Vasco da Gama menentang hebatnya gelombang Samudera Hindia; pentjarian rezekilah yang menjadi “noodster” dan “kompasnya” Admiral Drake, Magelhaens, Heemskerck atau Cornelis de Houtman. Nafsu akan rezekilah yang menjadi nyawanya kompeni di dalam abad ke-17 dan ke-18; nafsu akan rezekilah pula jang menjadi sendi-sendinya balapan tjari djadjahan dalam abad ke-19, yakni sesudah kapitalisme modern menjelma di Eropa dan Amerika (Soekarno, 1930:29).

Guna memperkuat argumennya itu, Soekarno mengutip pendapat para Marxis seperti Rudolf Hilferding, Karl Ranner dan H. N. Braisford. Bagi mereka, imperialisme adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakkan dari negara-negara

yang mempunyai “kapitalisme keliwat matang”, yaitu kapitalisme dengan pemusatan perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang dijalankan sampai sejauh-jauhnya.

Soekarno tidak saja menyandarkan dirinya pada pandangan kelompok Marxis, ia juga mengutip sejumlah pandangan dari kelompok sosialis Eropa, laporan-laporan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, gerakan Mahatma Gandhi di India dan juga para pejuang-pejuang Islam seperti Agus Salim. Cara ini dilakukan oleh Soekarno bukan saja untuk menunjukkan luasnya pendekatan yang dapat digunakan untuk membongkar persoalan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi, tetapi juga untuk memberikan dasar-dasar ideologis pemikiran nasionalismenya yang mencoba mempertemukan berbagai ideologi di bawah Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.

Dengan begitu pula Soekarno mengindari dipersamakannya PNI dengan PKI. Soekarno membagi imperialisme menjadi imperialisme tua dan imperialisme modern. Imperialisme tua adalah cara-cara pengedukan lama atas kekayaan Indonesia. Bahkan pada tataran imperialisme modern menggunakan cara-cara baru yang kadang lebih halus, tetapi lebih memberikan derita. Ia memaparkan tentang empat sifat imperialisme-modern, yaitu: (1) Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup; (2) Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik di Eropa; (3) Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing; dan (4) Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan-jutaan jumlahnya.

Ditambah lagi dengan “*Opendeur-politiek*” atau politik pintu terbuka yang diterapkan oleh penguasa Kolonial Belanda, maka masuk juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi internasional karenanya. Apabila dilihat sejak pledoi tersebut dibacakan, tidak banyak perubahan atas pembacaan Soekarno terhadap kerjanya imperialisme pada tahun itu dengan tahun-tahun sekarang ini. Soekarno menyebutkan bahwa inti dari persoalan kapitalisme dan imperialisme adalah persoalan “mentjari rezeki” atau dengan kata lain adalah persoalan ekonomi. Dengan menganggap inti persoalannya adalah persoalan ekonomi, maka nuansa Marxis terasa kuat dalam pledoi yang dibacakan tersebut.

2. Pandangan-pandangan Ir. Soekarno

Soekarno mengutip pendapat para Marxis seperti Rudolf Hilferding, Karl Ranner dan H. N. Braisford. Bagi mereka, imperialisme adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakan dari negara-negara yang mempunyai “kapitalisme keliwat matang”, yaitu kapitalisme dengan pemusatan perusahaan-perusahaan dan bak-bank yang dijalankan sampai sejauh-jauhnya.

Soekarno tidak saja menyandarkan dirinya pada pandangan kelompok Marxis, ia juga mengutip sejumlah pandangan dari kelompok sosialis Eropa, laporan-laporan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, gerakan Mahatma Gandhi di India dan juga para pejuang-pejuang Islam seperti Agus Salim. Cara ini dilakukan oleh Soekarno bukan saja untuk menunjukkan luasnya pendekatan yang dapat digunakan untuk membongkar persoalan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi, tetapi juga untuk memberikan dasar-dasar ideologis pemikiran nasionalismenya yang mencoba mempertemukan berbagai ideologi di bawah Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Dengan begitu pula Soekarno mengindari dipersamakannya PNI dengan PKI.

Pandangan Ir. Soekarno telah berpandangan bahwa pandangan kolonialisme dan imperialisme memberikan konsekuensi beberapa pandangan hukum, revolusioner, sosial dan lainnya.

Untuk itu beberapa pandangan di antaranya:

a. Pandangan Hukum Ir. Soekarno.

Soekarno merupakan orang yang paling mengidam-idamkan penyatuan antara Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Oleh sebab itu kelak ia hendak menyatukan ketiga ideologi itu menjadi satu dengan nama Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). Kata 'persatuan' merupakan salah satu inti dari pilihan politik Soekarno. Tetapi dalam persoalan hukum, Soekarno cenderung ke Marxisme. Ia barangkali tidak pernah membayangkan Islam menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum negara, bahkan ia merupakan salah satu penentang utama Islam menjadi satu-satunya dasar negara sebagaimana nampak dalam persidangan Konstituante. Soekarno juga bukan seorang nasionalis yang menghendaki adanya satu sistem hukum baru yang berbeda dengan sistem hukum lain untuk mempersatukan negeri.

Setelah kemerdekaan ia menempuh cara sporadis untuk mengubah hukum, tidak mementingkan bentuk, tetapi mengutamakan isi. Misalkan dengan mengeluarkan puluhan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), penetapan pemerintah, maklumat pemerintah, dekrit presiden dan berbagai bentuk instrumen hukum lainnya. Dalam soal pengembangan dan penggunaan hukum, Soekarno cenderung Marxis. Hal mana paling terlihat dalam pledoi Indonesia Menggugat.

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam pembahasan ini, antara lain: (1) Dekonstruksialisasi Hukum Kolonial; (2) Hukum sebagai Alat Politik; (3) Hukum sebagai Sensifitas dan Responsifitas Sosial.

- Dekonstruksialisasi Hukum Kolonial;

Melakukan dekonstruksi terhadap hukum kolonial merupakan salah satu benang merah pemikiran hukum Soekarno dalam Indonesia Menggugat. Bagi Soekarno, hukum kolonial telah dipergunakan sedemikian rupa oleh penguasa Belanda sebagai sarana memperluas rezeki dengan menyengsarakan rakyat pribumi. Ia juga mengkritik masukan tanaman-tanaman tertentu, seperti kopi dan nila yang kemudian diikuti dengan pengerahan tenaga penduduk pribumi untuk menanam dan mendirikan pabrik-pabrik bagi usaha-usaha partikelir.

Pandangan ini kemudian dapat dijadikan acuan bahwa hukum mengikat, karena adanya dominasi modal produksi dari kaum borjuis terhadap kaum proletar, hukum mengikat untuk melindungi dominasi kaum borjuis. Lebih lanjut Engels dan Marx menyatakan;

"Cara produksi kapitalis kian mengubah mayoritas penduduk menjadi kaum proletar, di samping itu ia juga menciptakan kekuatan yang dengan resiko mengalami kehancurannya sendiri, dipaksa untuk melakukan revolusi. Selain mendorong kian dipercepatnya transformasi pada sebagian besar sarana produksi, yang sudah diisolasi, menjadi milik negara, ia menunjukkan sendiri cara untuk melakukan revolusi ini. *Kaum proletar merebut kekuasaan politik dan mengubah sarana produksi menjadi milik negara*" (Huijbers, 1982:116).

Hukum kolonial, terutama yang lahir setelah sistem tanam paksa merupakan refleksi dari kemenangan kelompok liberal di Belanda. Kemenangan kelompok tersebut telah berhasil mengurangi sedikit kekuasaan raja dengan memperluas peranan perusahaan swasta untuk dapat menanam modal langsung ke tanah jajahan. Untuk memperlancar masukan modal swasta, maka hambatan-hambatan yang ada pada masa sebelumnya harus dilepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan membuat peraturan yang membebaskan. Soetandyo menyebut cara ini sebagai "de bewuste rechtspolitiek", yaitu masa-masa pembaruan yang sengaja dirancang dengan menjadikan hukum negara sebagai alatnya (Wignjosoebroto, 1994:19). Misalkan dengan diadakannya Bosch Reglement 1865, Agrarische Wet 1870, maupun Suiker Wet pada masa Gubernur Jenderal de Waal.

Dalam pledoi yang dibacakannya, Soekarno mengkritik sekalian hukum kolonial tersebut sebagai upaya untuk melanggengkan penguasaan atas tanah air dan manusia pribumi. Soekarno mengajukan perlawanan dan menjadikan kemerdekaan sebagai jawaban untuk mengubah keadaan dan mengganti hukum kolonial.

- Hukum sebagai Alat Politik;

Pandangan Marx tentang negara mau tidak mau mempengaruhi pemikirannya tentang hukum. Bagi Marx, “hukum (Recht) anda adalah kemauan dari kelas anda yang diangkat menjadi undang-undang (Gesetz), suatu kemauan yang memperoleh isinya dari kondisi material dari eksistensi anda” (Sidharta, 2005:19). Konsep hukum menurut Marx sangat kental dengan sistem kelas dan itu merupakan khas pemikirannya. Hukum dengan demikian menurut Marx merupakan “*alat bagi kelas penguasa untuk menundukkan pihak yang dikuasai secara sah*”. Jadi, ketika penguasanya adalah penguasa kolonial, maka hukumnya pun merefleksikan kepentingan penguasa kolonial.

Marx dan Engels dan juga seluruh gerakan Marxian memandang hukum sebagai bagian dari *superstruktur ideologi* yang mengemuka di atas realitas material sarana penguasaan produksi, karenanya hukum tidak berorientasi pada keadilan, tetapi merupakan sarana dominasi dan piranti para pengeksploitasi yang menggunakannya sesuai kepentingan kelas mereka.

Begitu pula dengan proses peradilan yang dilakukan terhadap Soekarno dan tiga teman sejawatnya di PNI. Lewat *de Haatzaai Artikelen* yang terdapat dalam KUHP, mereka dibawa di hadapan persidangan untuk diadili. *Haatzaai Artikelen* pun telah beberapa kali dikenakan kepada para pejuang kemerdekaan yang dianggap mengganggu kekuasaan kolonial. Ketika republik berdiri, aturan-aturan kolonial diberlakukan lewat aturan peralihan dalam UUD 1945. *De Haatzaai Artikelen* dipertahankan dan dipergunakan oleh penguasa republik untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh teman sendiri.

Cara Soekarno memperlakukan hukum sebagai alat politik juga nampak dalam gaya kepemimpinannya. Pada masa-masa awal kepemimpinan Soekarno, sejumlah maklumat, instruksi, penetapan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dibuat. Soekarno tidak begitu memusingkan tertib hukum, melainkan mengutamakan agenda politik yang ada di dalamnya. Ia pun pada tahun 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membubarkan konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Ia juga tidak menolak ketika Manifesto Politik yang bersumber dari pidatonya dalam acara 17-an dipergunakan oleh MPR menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

- Hukum sebagai Sensivitas dan Responsivitas Sosial

Meskipun tidak begitu memusingkan tertib hukum, Soekarno menaruh perhatian serius terhadap isi dari setiap peraturan dan instrumen hukum yang akan dikeluarkannya. Setiap peraturan dari suatu pemerintahan haruslah bagus. Di dalam Indonesia Menggugat Soekarno mengutip Prof. Colenbrander dan Prof. Veth yang menyampaikan: Suatu pemerintahan yang jelek peraturannya, adalah suatu bentjana umum (*maar een slecht ingericht bestuur is en algemeene ramp*).

Dengan demikian, yang dilihat dari peraturan adalah isinya, bukan bentuknya. Peraturan yang dibuat oleh penguasa haruslah memperhatikan nasib rakyat yang diaturnya. Oleh karena itulah Soekarno mengkritik pemberlakuan Agrarische Wet 1870, Suiker Wet serta politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh penguasa kolonial karena tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Alih-alih memberikan manfaat, malah menimbulkan mudharat, kemiskinan, penghisapan terhadap tanah air, satwa dan juga manusia Indonesia.

Dengan kata lain, bagi Soekarno, hukum yang tidak memiliki sensitivitas sosial bukanlah hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Karl Marx yang membedakan antara hukum dengan tata hukum. Menurut Marx, tata hukum tidak selalu merupakan hukum

yang sejati. Hukum yang sejati adalah hukum yang diciptakan seseorang karena dianggap sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam hati manusia. Dengan demikian terdapat tingkatan dalam hukum, hukum ideal dan aktual. Apabila hukum aktual menjauhkan diri dari hukum ideal maka hukum aktual kehilangan artinya sebagai hukum (Huijbers, 1982:116)

b. Pandangan Revolusioner Ir. Soekarno dalam Imperialisme

Ir. Soekarno membagi dua jenis imperialisme berdasarkan cara akumulasi keuntungannya, yakni imperialisme tua dan imperialisme modern. Imperialisme tua, sebagaimana dijalankan oleh *East India Company* (EIC) dan VOC, adalah imperialisme yang ditopang dengan cara-cara akumulasi primitif: perampasan dan kekerasan. Sedangkan imperialisme modern, yang mulai merambah Hindia-Belanda di abad ke-19 dan 20, berbasiskan pada liberalisasi investasi, perdagangan bebas dan komersialisasi tanah.

Ir. Soekarno juga membeberkan empat ciri imperialisme modern: *pertama*, menjadikan Indonesia sebagai tempat pengambilan bekal hidup; *kedua*, menjadikan Indonesia sebagai negeri tempat pengambilan bekal-bekal (bahan baku) bagi pabrik-pabrik di Eropa; *ketiga*, menjadikan Indonesia sebagai pasar penjualan barang-barang hasil dari berbagai industri di Eropa; dan *keempat*, menjadikan Indonesia sebagai tempat atau lapang usaha bagi penanaman modal asing.

Esensi imperialisme adalah menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis. Sukarno menyebutnya politik *drainage*. *Drainage*, atau drainase dalam bahasa Indonesia, adalah saluran untuk mengalirkan air hingga kering. Jadi, imperialisme itu mirip drainase (Kartodirdjo:1999).

Untuk menopang politik drainase itu, kolonial Belanda kemudian menerapkan *opendeur politiek* atau *politik pintu terbuka*. Dengan begitu, modal partikelir bisa bebas masuk ke Indonesia. Agar modal partikelir makin tertarik, dibuatlah dua Undang-Undang (UU), yakni UU agraria dan UU Tanam Tebu. Tidak hanya itu, proyek infrastruktur pun digenjut. Dibangunlah jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, jalan kereta api dan lain-lain untuk melancarkan lalu-lintas barang, tenaga kerja dan kapital.

“Tetapi tidak dapat disangkal bahwa alat lalu-lintas modern itu menggampangkan geraknya modal partikelir. Tidak dapat disangkal bahwa alat-alat lalu lintas itu menggampangkan modal itu jengkelitan di atas padang perusahaannya, membesarkan diri dan beranak di mana-mana, sehingga rezeki rakyat kocar-kacir oleh karenanya,” inilah perkataan dari Ir. Soekarno.

Dampaknya sudah bisa ditebak, yakni kemelaratan rakyat Indonesia. Soekarno mengutip data statistik jaman itu, “Tiap rumah tangga marhaen hanya mendapat 138,50 gulden per tahun atau 0,40 gulden per hari”. Pendapatan segitu, kata Soekarno, hanya membuat marhaen, “Sekarang makan, besok tidak”.

Menurut Soekarno, keadaan itulah yang melahirkan perlawanan. Bukan karena hasutan kaum pergerakan. Menurutnya, lahirnya pergerakan rakyat itu adalah hasil dari kesengsaraan dan kemelaratan akibat penindasan kolonialisme Belanda. “Jangankan manusia, cacing pun tentu bergerak berkeluget-keluget kalau merasakan sakit,” inilah argumentasi Ir. Soekarno. Dalam konteks itulah, organisasi pergerakan macam PNI dan lain-lain dilahirkan. Organisasi pergerakan itu sekedar mengarahkan dan melapangkan jalan perjuangan rakyat agar benar-benar menyasar musuhnya dan mencapai tujuannya (Suhartono. 2001).

Ir. Soekarno menegaskan bahwa partainya, PNI, adalah partai anti-kapitalis dan anti-imperialis. Hanya saja, kata dia, ketika melancarkan kritik atau serangan, PNI tidak pernah menggunakan ‘kritik palsu’ dan subjektif. Sebaliknya, PNI menggunakan kritik rasional dan ilmiah. Ir. Soekarno juga menampik tuduhan pemerintah kolonial bahwa PNI sedang mempersiapkan pemberontakan bersenjata. Dia bilang, kendati PNI menggunakan istilah “aksi dengan perbuatan”, bukan berarti PNI menghalalkan cara

kekerasan: bedil, bom, dan dinamit. Bagi PNI, senjata perlawanan yang mematikan imperialisme bukanlah bedil dan bom, melainkan organisasi massa yang mengakar kuat di kalangan kaum buruh dan marhaen.

PNI juga tidak mau tawar-menawar dengan cita-cita kemerdekaan. Bagi PNI, kemerdekaan nasional merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. PNI juga pantang mengemis-ngemis meminta kemerdekaan kepada penjajah. PNI teguh pada prinsip: non-koperasi dan *self-help*. Di sidang pengadilan, Soekarno berteriak lantang: Indonesia merdeka oleh revolusi.

c. Pandangan Intelektual Ir. Soekarno dalam Nilai Ketuhanan.

Ketika Ir. Soekarno ada perlawanan dari pergerakan kolonial Belanda, bahkan sampai dengan dipenjaranya Ir. Soekarno di penjara Sukamiskin, Ir. Soekarno melakukan perenungan kebijaksanaan secara filosofis dengan didasari nilai-nilai ketuhanan. Lebih menarik lagi adalah Soekarno lebih banyak mendapat pengetahuan tentang Islam dari buku-buku yang dibacanya ketika Soekarno di penjara. Buku keislaman yang dibaca Soekarno tidak hanya berasal dari dunia Islam namun juga berasal dari Barat. Setelah Soekarno mempelajari Islam untuk beberapa waktu lamanya, Soekarno mulai memunculkan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikirannya tentang ajaran Islam. Dalam pemikirannya, Soekarno banyak menentang kekolotan, kejumudan, takhayul, dan kemusyrikan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Selain itu, Soekarno juga banyak melahirkan gagasan tentang masalah ketuhanan yang sangat menarik untuk dicermati. Oleh karenanya, Tuhan dalam pemikiran Soekarno berbeda dengan keyakinan kaum muslimin lainnya. Menurut Soekarno, Tuhan mempunyai sifat tidak terbatas, Tuhan tetap Maha Esa, tidak terbilang, bahkan tidak sedikit pemikirannya Soekarno sampaikan dalam pidato kenegaraan.

Beberapa pemikiran intelektual Ir. Soekarno terhadap nilai ketuhanan ketika pada masa perlawanan kolonial Belanda di antaranya adalah "*Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan*". (Tunggul Alam, 2003:196)

Soekarno mulai berpikir tentang Islam bersamaan waktunya dengan pengembaraan pemikirannya di lapangan politik. Oleh karena sasaran perjuangan politiknya adalah menciptakan persatuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, maka hal yang mendorongnya untuk memikirkan Islam adalah untuk mencari cara agar Islam hidup kembali sebagai kekuatan pembebas umat dari keterbelakangan. Dan hal ini dapat tercapai apabila Islam telah berfungsi sebagai landasan etos kerja. Islam dapat menjadi kekuatan pembebas, apabila penganut Islam telah dapat menangkap api Islam. Menempatkan Islam sebagai landasan budi dan moral, berarti melepaskan Islam secara formal dan struktur pemerintahan, tetapi tanpa melepaskan Islam dari pergaulan masyarakat dan kehidupan bernegara (Lubis, 1991:169-170)

Soekarno tidak pernah membatasi bacaannya hanya pada buku-buku Islam, melainkan juga membaca buku-buku tentang agama Budha, Hindu, dan Kristen. Namun kepuasan itu tidak juga Soekarno temukan. Soekarno menjadi manusia yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhan. Soekarno merasa belum menemukan apa dan siapa Tuhan itu. Perasaannya mengalami adanya Tuhan, tetapi Soekarno ingin meneruskan dan menganalisa apa dan siapa Tuhan itu, dengan kapasitas intelektualnya, Soekarno telah dapat merasakan namun tidak dapat menjelaskan secara ilmiah (Soetardjo, 1993:47)

Soekarno menjadi rajin melakukan studi Islam mulai dari buku pengajaran shalat sampai pada buku-buku yang menyangkut masalah politik umat Islam (Shodiq, 1994:17). Soekarno mulai yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah

selaku sang pencipta pemilik alam semesta. Soekarno masuk penjara, juga merupakan atas kehendak Allah. Seseorang pernah menanyakan kepada Soekarno, “Bung, bilakah Bung keluar bebas?”, selanjutnya dengan lantang dan mantap Soekarno menjawab, “Saya pun tidak tahu, Yang Maha Tahu itu adalah Allah” (Shodiq, 1994:51).

Dengan penuh ketekunan, Soekarno secara terus-menerus menggali ajaran Islam. Hingga Tuhan telah membuka hati Soekarno untuk sampai kepada Islam. Allah telah merubah nasib Soekarno, karena Soekarno sendiri telah berusaha untuk merubahnya, dari keadaan yang tidak mengerti dan tahu tentang agama menjadi seorang muslim, dan menghayati betul firman Tuhan dalam surat al-Ra’du, ayat 11, yang artinya: “*Tuhan tidak merubah apa yang ada pada suatu bangsa, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri*”.

Tuhan dalam konsepsi Soekarno menjadi berbeda dari pemikiran kebanyakan umat Islam pada umumnya. Menurut Soekarno pencarian dan pengembaraan keberadaan Tuhan harus dengan merenungkan, menghayati sedalam-dalamnya dan Tuhan betul-betul bersemayam dalam hati sanubari manusia. Sejarah panjang tentang kisah orang-orang yang mencari Tuhan, akibatnya ada manusia-manusia yang putus asa dan akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sampai zaman modern bahwa manusia dapat saja membuat bom atom, membuat kendaraan angkasa luar, namun manusia masih juga ada yang belum mengenal Tuhannya, tidak tahu di mana tempat zat yang mengatur alam ini.

Menurut Soekarno, Tuhan itu tidak berbentuk seperti pohon atau seperti batu dan juga tidak berbentuk seperti *blegernya* (wujud) manusia seperti kita. Soekarno akhirnya menyadari, sebagai umat Islam akhirnya mencoba dan membaca kitab suci Al-Qur’an, dan setelah Soekarno merenung dan membacanya, pada akhirnya Soekarno menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada, ghaib, tidak dapat dilihat, bukan suatu person, Tuhan adalah zat yang meliputi seluruh alam ini.

d. Nilai Sosial dalam Pandangan Ir. Soekarno

Nilai sosial yang tersirat dari cuplikan pidato di atas adalah kesadaran terhadap kemerdekaan untuk memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat Indonesia sendiri, mengatur tata hidup sendiri, mengatur kebijakan sendiri, mengatur ekonomi sendiri, karena bangsa Indonesialah yang paling berhak untuk itu. Perjuangan tersebut dilakukan melalui persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama. Makna yang tersirat dari pidato tersebut adalah untuk meraih keadilan social, maka langkah utama yang dibangun adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Dasar filofosis kuat yang mempertautkan bangsa yang bhinneka ini ke dalam keikaan yang kokoh. Dengan belasan ribu pulau, ratusan suku-bangsa dan kebudayaan, aneka agama dan kepercayaan, serta variasi kelas sosial yang tinggi, Indonesia diharuskan menemukan cara yang adil dan berkeadaban sekaligus fondasi yang solid dalam mengelola kemajemukan menuju kesejahteraan.

Makna yang disiratkan adalah bahwa Republik Indonesia merupakan milik seluruh bangsa yang harus diperjuangkan bersama melalui persatuan dan kesatuan. Pidato tersebut menggambarkan titik-titik persamaan nilai dan praktek sosial yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan aneka suku bangsa dan bahkan agama. Nilai-nilai dan praktek sosial ini telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa. Di sepanjang sejarah, nilai-nilai dan praktek sosial ini telah terbukti mampu menjadi rujukan bersama yang memungkinkan berbagai kelompok dapat hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Arah perjuangan yang dipaparkan oleh Bung Karno adalah ajakan untuk tetap mempertahankan kemandirian dan kepercayaan diri dalam mengelola bangsa dalam mengisi kemerdekaan, kondisi ini tidak terlepas dari fenomena sejarah pada masa itu dimana terjadi beberapa peristiwa di antaranya adalah perjanjian Renville, serangan umum 1 Maret 1949, perundingan Kaliurang Roem Royen KMB 1950, pada masa itu

juga ada transisi politik dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang kembali menjadi NKRI (Umar, 2001).

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Bung Karno tetap bersikeras bahwa untuk mengisi kemerdekaan dengan berdikari dan mandiri membutuhkan generasi manusia Indonesia dengan karakter kepahlawanan yang unggul, yang sanggup merancang skenario masa depan bangsanya menuju bangsa yang mandiri dan bermartabat. Pidato tahun 1948 ini juga menyiratkan gagasan pembangunan karakter bangsa unggul telah ada semenjak diproklamirkannya republik ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno pernah menyatakan perlunya *nation and character buildings*. Walaupun pernyataan tersebut dalam konteks politik, namun secara eksplisit mengandung arti bahwa pembangunan Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun fisik, akan tetapi harus termasuk membangun karakter dan budaya bangsa bahkan perjuangan dengan yang sarat dengan nilai sosial perlu dilanjutkan dengan perjuangan politik, perjuangan konsep, dan perjuangan fisik jika masih diperlukan pada masa itu.

Berbicara tentang cara mencapai keberhasilan ide menuju keadilan sosial ini, maka Soekarno melihat bahwa keadilan sosial tidak bisa terlepas dari usaha mempersatukan bangsa. Demikian juga bahwa persatuan bangsa juga tidak bisa lepas dari tata negara Gotong Royong yang menurut Soekarno adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Pidato Bung Karno tentang konsep gotong-royong ini merupakan pernyataan Soekarno untuk mengajak masyarakat Indonesia memahami bagaimana bangsa Indonesia harus mencapai visi-misi dan tujuan negara Indonesia.

Pernyataan ini jelas memberikan pemahaman baru dalam aspek sosiologis, bahwa sistem gotong-royong adalah bagian dari nilai kehidupan keluarga dan warisan budaya bangsa Indonesia yang berharga. Pernyataan tentang negara Gotong-Royong hendak mengarah pada nilai kebersamaan dan persatuan bangsa. Inilah konsep negara yang dicita-citakan Soekarno, yakni membentuk suatu komunitas yang solid dan kuat (Rizqy, 2009).

3. Ilmu Politik Pemerintahan dan Kepemimpinan Ir. Soekarno

Kehidupan dan dinamika politik di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik para tokoh, negarawan, atau para elit-elit politik tanah air pada awal kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran politik tersebut menjadi salah satu aspek yang mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pemikiran politik itu sendiri dapat dimaknai sebagai bagian atau dasar dalam falsafah politik. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dalam setiap pemerintahan atau kekuasaan pasti terdapat pemikir-pemikir politik dengan pemikiran politiknya masing-masing. Hal tersebut akan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik di tanah air. Menurut Feith dalam Alfian (1981:8) dijelaskan bahwa ada lima aliran yang menjadi sumber atau mewarnai pemikiran-pemikiran politik Indonesia, yaitu: (1) tradisi Jawa, (2) Islam, (3) nasionalisme radikal, (4) komunisme, dan (5) sosial demokrasi. Penjelasan kelima aliran tersebut adalah sebagai berikut:

Kesatu, Tradisi Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong Praja).

Kedua, Islam yang terbagi menjadi dua varian: kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith)- atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum- yang berpusat pada Partai Masjumi, serta kelompok Islam konservatif, atau sering disebut tradisional yang berpusat pada Nadhatul Ulama.

Ketiga, yaitu Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Keempat, Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan idiom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia.

Kelima, Sosialisme Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia. Pendapat ini pada intinya melihat bahwa pada umumnya pemikiran-pemikiran itu tidak lahir dari suatu pengamatan yang dalam tentang kenyataan-kenyataan objektif yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Menurut saya pandangan itu tentu tidak berlaku sama bagi semua pemikir politik di Indonesia.

Oleh karena itu masih dapat diperdebatkan. Dari sekian banyak pemikiran politik yang ada di Indonesia, tiga pemikiran politik dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki tonggak sejarah dan masih relevan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan politik masyarakat di Indonesia pada saat sekarang ini. Tokoh-tokoh yang pemikiran politiknya akan diuraikan adalah Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka. Pada penelitian ini tentu dikaji tokoh politik pemerintahan dan kepemimpinan Ir. Soekarno serta pemikiran-pemikirannya.

Pemikiran politik Soekarno yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang Nasakom, Nasasos, dan gotong-royong. Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunis. Nasasos (nasionalisme, agama, dan sosialis) adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke partai komunis. Untuk menghindari adanya kesan bahwa Soekarno ada dibalik komunis maka ia melahirkan konsep baru yaitu Nasasos.

Konsep berikutnya yang dikembangkan oleh Soekarno yaitu konsep gotong royong. Gotong royong menurut Soekarno sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia. Gotong royong sudah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Konsep ini menurut Soekarno akan menjadi ciri kemandirian bangsa. Maju mundurnya bangsa Indonesia tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri tanpa bergantung pada bantuan asing yang dikenal dengan sebutan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Hal ini sebagaimana dijelaskan Benhard Dahm (1987:140) bahwa Soekarno menjelaskan tidak ada tempat bagi kepercayaan bahwa pihak penguasa akan memberikan kepada mereka ruang gerak untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Hal ini dikandung maksud adalah Soekarno tidak ingin memberi kesempatan kepada bangsanya sendiri untuk tergantung kepada bangsa lain. Jati diri bangsa serta maju mundur bangsa dalam pandangan Soekarno adalah dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari.

4. Ilmu Sosial dan Keteladanan Ir. Soekarno

Ketika Ir. Soekarno memberikan pemikiran tentang ilmu sosial dalam kerangka pembangunan sosial kultural mengemukakan bahwa rasa kemanusiaan akan menimbulkan kasih sayang dan toleransi di antara sesama. Perasaan-perasaan itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan nasionalisme Soekarno. Menurutnya, nasionalisme yang sejati bukan semata-mata atau copi tiruan Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalismenya ialah sama dengan “rasa kemanusiaan”. Nasionalisme menurut Soekarno adalah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi cinta pada lain-lain bangsa.

Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan hidupnya sebagai bakti. Nasionalisme dibutuhkan unsur keberanian dan berkorban untuk bangsa. Penderitaan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme Barat memberikan pengaruh terhadap warna nasionalisme yang diyakininya, yaitu nasionalismeku adalah perikemanusiaan dalam memperjuangkan kemerdekaan (Syamsuddin, 1998:41).

Munculnya nasionalisme pada dasarnya karena kebutuhan bersama dalam hidup bernegara untuk mencapai kemerdekaan. Perbudakan harus dilenyapkan dari negara Indonesia dan merubah menjadi semangat perjuangan. Oleh karena perbudakan inilah yang menyebabkan imperialisme berdiri dengan gagah perkasa, semangat perbudakan inilah yang harus digugurkan dan diganti dengan semangat perlawanan. Sosio-nasionalisme menganjurkan pencarian kemerdekaan sebagai salah satu alat mengurangi rasa ketidakmampuan (rendahnya daya pikir dan pengetahuan, ketertinggalan) di dalam masyarakat. Nasionalisme Soekarno mengarah pada keinginan untuk bangkit serta lepas dari belenggu yang menyengsarakan karena kebodohan yang memang diciptakan oleh para penjajah. Kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme sekaligus syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna (Soekarno, 1982:42)

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan nasionalisme benar-benar telah memasyarakat yang tidak hanya memandang obyek penindasan yang dalam hal ini adalah kaum perempuan, tapi lebih pada nuansa kemanusiaan dan kesadaran akan heterogenitas masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan.

Dalam konteks demokrasi, Soekarno berpendapat bahwa sosio-demokrasi adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada kaum yang sengsara. Menurut Soekarno, demokrasi mengandung tiga unsur pokok, yakni prinsip mufakat, prinsip perwakilan dan prinsip musyawarah (Sukarno, 1985:70).

Demokrasi yang dianjurkan oleh Bung Karno adalah demokrasi yang mempunyai dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Dalam pandangannya tentang demokrasi Soekarno mengatakan: "Kalau mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik *economische democratie*, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial." (Katoppp, 1981:28). Nasionalisme dan demokrasi yang dianut oleh Dawam Rahardjo, "Bung Karno Sebagai Pemikir Islam", dalam Indonesia haruslah memberi tempat yang aman bagi kaum kecil yang disebutnya sebagai marhaen, yaitu kaum yang melarat karena penghisapan kolonial tetapi masih tetap memiliki alat-alat kecil untuk berproduksi.

Nasionalisme Indonesia atau nasionalisme Indonesia Modern tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama, daerah dan strata sosial. Nasionalisme memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Nasionalisme Indonesia tidak mengenal keborjuisan dan keningratan. Rakyat sekarang harus mempunyai kemauan dan keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan tubuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadi bangsa itu.

Beberapa pemikiran Soekarno tersebut muncul di tengah perkembangan nasionalisme Barat yang menafikan terhadap asas kelompok kultur, agama, atau suku bangsa sebagai unsur di dalam nasionalisme yang universal. Nasionalisme tersebut justru menjadi satu policy yang didasarkan atas kekuatan dan ambisi pribadi sehingga dalam perkembangannya tumbuh menjadi bentuk nasionalisme imperialisme yang bersifat non-humaniter (tanpa nilai kemanusiaan) (Pratiwi, 2001:211)

Itulah sebabnya Soekarno kemudian membagi nasionalisme menjadi dua, yaitu nasionalisme Barat dan nasionalisme Timur. Ide Soekarno tentang nasionalisme yang membagi nasionalisme dalam dua bentuk tersebut dikarenakan keduanya bertolak belakang. Nasionalisme Barat yang muncul dibelahan Eropa mengandung prinsip yang

sama sekali berlawanan dengan Nasionalisme Timur yang muncul di kawasan Asia, Asia Tenggara khususnya Indonesia. Soekarno banyak mengkritik bentuk nasionalisme Barat, antara lain: Bahwa nasionalisme Eropa ialah satu nasionalisme yang bersifat serang menyerang, satu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, nasionalisme yang bersifat serang menyerang, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, nasionalisme semacam itu pastilah salah, pastilah binasa. Lahirnya Nasionalisme yang didasarkan atas kekuatan individualisme (*Power of Individualism*) dan *self interest* (ambisi pribadi), menjadikan paradigma baru nasionalisme Barat sebagai satu policy yang *chauvinist* dan *non humaniter*. (Pratiwi, 2001:212)

Faktor lain yang juga amat penting keberadaannya dalam mendukung asumsi Soekarno adalah tergelincirnya pemahaman agama sebagai bentuk pemberian legitimasi, yakni mensyahkan, memberi dasar atau memberi arti pelaksanaan kekuasaan demokratis dalam masyarakat. Soekarno meletakkan ilustrasi di atas lewat prespektif Islam. Menurutnyanya: “Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang di diami dan bekerja untuk rakyat di antara mana ia hidup.” Sementara itu saat Solichin Salam mengadakan wawancara langsung dengan Soekarno tentang hal tersebut, Soekarno mengatakan: “Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih dari pada Islam. Pengeramatan manusia itu, adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat, oleh karena pengeramatan manusia itu, melanggar tauhid. (Pratiwi, 2001:213).

Demikianlah gambaran nasionalisme Barat dalam prespektif sekaligus sebagai bentuk kritikan Soekarno, yang mengandung individualisme, liberalisme dan melahirkan kapitalisme serta imperialisme. Sementara nasionalisme Timur dalam pandangan Soekarno antara lain: Nasionalisme yang di dalam kelebarannya dan keluasannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup sehingga Soekarno tidak mengembangkan nasionalisme bersifat agresif atau menyerang bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme yang membuat seseorang menjadi “Perkakas Tuhan” dan membuat seseorang hidup dalam roh...dengan nasionalisme yang demikian maka terdapat kesamaan pendapat dan perasaan terhadap tanah air mereka masing-masing, yaitu rasa cinta yang besar, rasa kagum terhadap segala isi alamnya, rasa ingin mengembalikan harkat diri mereka dan melepaskan diri dari cengkraman tangan asing, sehingga kemerdekaan adalah sebuah keharusan, agar dapat lebih leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Nasionalisme yang sama dengan rasa kemanusiaan.

Jadi Nasionalismenya tidak membenci bangsa-bangsa lain adalah nasionalisme yang akan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme yang menghargai bangsa lain dan tidak akan merendahkan atau mengecilkan bangsa lain, karena sifat yang demikian tidaklah berbeda dari sifat kaum kolonial.

Soekarno menanamkan faham kebangsaan sebagai nasionalisme Timur atau ke-Timuran yang mempunyai nilai lebih tinggi dari imperialistis nasionalisme Barat yang selalu berkonflik satu dengan lainnya. Sebagaimana negara lainnya, Indonesia memiliki bentuk nasionalisme sesuai dengan letak geografisnya sebagai personal negara Asia Tenggara. Kelahirannya bukan sebagai kado sementara, akan tetapi lebih proses kausalitas yang tak lepas dari dinamika historis.

Nasionalisme mulai menunjukkan pubersitasnya ketika masa memasuki awal perang pasifik yang ditandai dengan masuknya ideologi fasisme Jepang. Selama masa pendudukan Jepang nasionalisme menjadi semakin militan, terutama karena adanya pengaruh dari pengalaman perang dan militerisme Jepang. Soekarno menguatkan ilustrasi di atas lewat pidatonya di depan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengajukan lima asas yang lebih dikenal dengan sebutan Pancasila sebagai landasan filosofi dan politik negara kebangsaan (*nation-state*). Soekarno menghilangkan referensi apapun yang berbau ideologi Jepang. Soekarno cenderung

menyetir pendapat Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa pada hakekatnya nasionalisme adalah kemanusiaan.

Nasionalisme yang berperikemanusiaan berarti nasionalisme yang memberi tempat bagi aliran-aliran lainnya. Islam meskipun tidak mengenal batas-atas negara karena prinsipnya yang utama adalah persaudaraan antar manusia, tetapi Soekarno tidak menentang nasionalisme. Seperti Marxisme adalah aliran yang mendasarkan diri pada materialisme atau kebendaan, tetapi sangat menentang penindasan. Jadi meskipun nasionalisme yang bersifat cinta tanah air dan bangsa,

Islam yang mendasarkan diri pada keyakinan agama atau bersifat spiritual sedang marxisme yang mendasarkan diri pada materialisme atau kebendaan, tetapi karena ketiganya mengalami latar belakang sejarah politik yang sama yaitu penjajahan, menurut Soekarno, penyatuan ketiganya dapat menjadi roh perjuangan atau kekuatan inti perjuangan. Dan penyatuan tersebut tentunya tidak mengharuskan orang berpindah ideologi yang Islam tetap memegang Islamnya, demikian pula yang nasionalis ataupun yang marxis. Islam sendiri menghendaki nasionalisme yang bukan untuk menyombongkan diri, jatuh menjatuhkan dan bukan untuk merusak hidup berjamaah dan bermasyarakat.

Sebagai suatu gerakan yang diwahyui atau diilhami oleh gerakan-gerakan di negeri-negeri Asia, maka Soekarno kemudian melihat bahwa prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Timur, kemudian dimiliki juga oleh gerakan nasionalisme Indonesia. Kalau Soekarno menyebutkan, bahwa gerakan nasionalisme di dunia timur berkawinan dengan Marxisme, dan membentuk nasionalisme baru, maka nasionalisme baru inilah yang hidup dikalangan rakyat Indonesia.

Pendidikan keteladanan menurut Soekarno menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan karena pada kenyataannya merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat. Islam, yang diyakini sebagai agama paling sempurna, menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting yang mewajibkan umatnya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Islam.

Kendati demikian, nama Soekarno tidak hanya disegani di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sebagai pejuang kemerdekaan dan presiden pertama negeri ini, Soekarno sangat menentang setiap bentuk imperialisme dan neokolonialisme. Kiprah dan pemikiran Soekarno terekam dalam catatan-catatan sejarah. Telah banyak diterbitkan buku yang menceritakan perjuangan dan kehidupan Soekarno. Dari sekian banyak buku itu ternyata kurang menggali pemikiran Soekarno dalam aspek pendidikan dan keteladanan.

Ketika Soekarno menaruh perhatian terhadap pendidikan Islam mungkin ada yang keheranan. Pasalnya, Soekarno selama ini tidak dikenal sebagai tokoh dan pemimpin muslim. Keheranan itu setidaknya perlu dihilangkan karena sebenarnya Soekarno juga mendalami Islam, bahkan pernah berkecimpung dalam salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di negeri ini. Bahkan, tokoh Islam dari luar Indonesia seperti Jamaluddin Al-Afghani diakui memberikan pengaruh pada pemikiran Soekarno.

D. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu. (Mestika Zed, 2004)

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat, lebih khususnya perpustakaan, *e-book*, internet, dan sebagainya sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan.

2. Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, namun juga bersifat kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka metode kajian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, *pertama*, dengan mencatat semua temuan mengenai kajian pada dimensi politik dan sosial pada buku Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat terutama pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai dimensi politik dan sosial yang dapat dikaji berdasarkan pustaka yang ada. Setelah mencatat, *kedua*, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada aspek-aspek politik dan sosial lainnya dengan berbagai kajian dan aspek yang meliputi pemerintahan, kenegaraan, maupun aspek lainnya dalam kajian penelitian ini.

Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, utamanya dalam tulisan ini adalah pemikiran yang kritis tentang pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno pada buku, "Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat".

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis (Kaelan, 2010:143). Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian kepustakaan, misalnya tentang karya tokoh pemikir bangsa Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat dan lain sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh kenegaraan tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah kenegaraan dalam dimensi politik dan sosial ketatanegaraan, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan metode yang memadai.

Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian. Untuk mendapatkan segala kebutuhan tersebut di atas, bisa dihasilkan melalui perpustakaan, toko buku, pusat penelitian dan jaringan internet *e-book* dengan mengakses wacana dan info mengenai pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam bukunya "Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat".

Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

3. Sumber Data.

a) Sumber Primer, yaitu:

Buku Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat, berisikan materi dan substansi pokok penelitian ini dengan bahasan pergolakan politik dan sosial Ir. Soekarno pada masa kepemimpinan dan pemerintahannya di Indonesia. Di sisi lain juga mempersoal isi dan hasil perenungan maupun pemikiran Ir. Soekarno dalam perlawanan era kolonial;

b) Sumber Sekunder, meliputi

- Anti kolonialisme dan Anti-Elitisme Soekarno Muda,
- Dhiana Shopa Aksi dan Reaksi Soekarno,
- Jurnal maupun penelitian lainnya yang mendukung sumber kepustakaan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Kajian.

Teknik pengumpulan kajian, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang Pandangan Politik dan Sosial Ir. Soekarno pada Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Pada hakikatnya, tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini. Namun, tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan pekerjaan secara sistematis dan sesuai dengan objek kajiannya. Oleh karenanya perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.

Dua instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data ini, pertama, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam pengumpulan data ini peneliti bisa menggunakan alat rekam, seperti fotocopy dan lain sebagainya.

Kedua, kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan. Selain itu pula kartu data memberikan solusi jika instrumen pertama sulit untuk dioperasionalkan, kartu data bisa digunakan sebagai pengganti dari instrument pertama, namun dengan konsekuensi lamanya waktu berada di lokasi sumber data.

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Setelah menentukan lokasinya, mulai mencari data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang kemudian didapatkan di lokasi akan dibaca oleh seorang peneliti, karena tugas utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh, yakni:

- a. Membaca pada tingkat simbolik. Seorang peneliti tidak mungkin akan membaca seluruh sumber yang didapatkan dari pertama hingga akhir. Jika itu dilakukan, maka akan menyita waktu dan akan mengurangi efisiensi waktu penelitian. Tahap ini ialah dengan tidak membaca secara keseluruhan melainkan dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab sampai pada bagian terkecil dari buku. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian. Hasilnya akan dicatat dalam kartu data dan diberikan kode sesuai dengan peta dan kategori penelitian yang dilakukan.
- b. Membaca pada tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Tiap poin yang dibaca dilakukan analisis dalam data tersebut. Peneliti harus mendahulukan data yang bersifat primer, jika sudah dianggap cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat sekunder.

Setelah membaca secara semantik dilakukan, dicatat dalam kartu data, tahapan pencatatan dalam kartu ada di antaranya:

- a. Mencatat secara *qoutasi*, yaitu dengan mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikitpun redaksi sumber data atau dari penulis karya tersebut, biasanya untuk mencatat terminologi-terminologi kunci untuk mengembangkan interpretasi yang lebih luas.
- b. Mencatat secara *paraphrase*, dengan menangkap intisari dari data dengan redaksi kata yang disusun oleh peneliti sendiri. Proses ini bisa dilakukan dengan analisis *verstehen* untuk menangkap intisari dari data yang berupa uraian panjang lebar, lalu diambil intisari pemahaman dari uraian panjang tersebut menjadi kalimat singkat dan padat agar dengan mudah terekam pada kartu data.
- c. Mencatat secara *sinoptik*, mencatat model ini lebih pada ringkasan, artinya setelah membaca bagian atau sub bagian data kategori tertentu, kemudian peneliti membuat ringkasan atau sinopsis yang harus benar-benar persis sama secara logis dari data yang dibaca.
- d. Mencatat secara *presis*. Mencatat model ini adalah kelanjutan dari mencatat secara sinoptik. Setelah mencatat secara sinoptik, peneliti akan menghadapi hasil dari catatan sinoptik yang banyak, maka perlu pengkategorian catatan, misalnya unsur nilai agama, nilai budaya, epistemologi, aksiologi, etika dan unsur-unsur lainnya. Peneliti lebih lanjut membuat catatan yang lebih padat lagi berdasarkan pada catatan sinoptik yang terkumpul.
- e. *Pengkodean*. Tahap ini adalah tahap yang paling teknis dalam sebuah penelitian, tujuannya mensistematiskan agar data yang tidak teratur atau yang bertumpuk.

5. Teknik Analisis Kajian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.

Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), display data, dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

- a. Reduksi data (*data reduction*). Pada tahap awal ini peneliti melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
- c. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun, hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, display data, dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Karena menganalisa pemikiran tokoh yang pernah hidup di masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini akan menggunakan tinjauan kesejarahan yang dikenal dengan istilah *historical approach* (Notosusanto, 1978:36)

Dengan menggunakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau yang mungkin mempengaruhi pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno pada buku “Indonesia Menggugat”. Rekonstruksi tersebut dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah setelah itu adalah menganalisa data. Dalam hal ini data yang telah diperoleh akan dianalisa isinya. Artinya, setelah data dideskripsikan apa adanya tentang konsep hierarki kebutuhan dari pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno maka dengan deskriptif-analisis, peneliti menguraikan isi serta membandingkan obyek penelitian dari tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya.

6. Kerangka Hasil Penelitian.

Perlunya kerangka berfikir dalam hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan dan gambaran secara garis besar, berkaitan dengan deskripsi kepustakaan tentang analisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku Indonesia Menggugat. Adapun peneliti akan menggambarkan sebagaimana di bawah ini:

ANALISIS PANDANGAN POLITIK DAN SOSIAL Ir. SOEKARNO DALAM BUKU INDONESIA MENGGUGAT

Latar Belakang Masalah

Alasan-alasan peneliti mengambil penelitian ini di antara:

1. Peneliti merasa tokoh politik dan kenegaraan seperti Ir. Soekarno seringkali dilupakan oleh generasi sekarang, sehingga peneliti ingin mengangkat kembali secara politik ketatanegaraan dan pemerintahan Ir. Soekarno;
2. Peneliti merasakan penderitaan politik dan sosial pada masa pemerintahan Ir. Soekarno setelah membaca buku *Indonesia Menggugat*, sehingga secara lebih mendalam peneliti mengangkat judul ini

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana analisis pandangan politik dan sosial Ir. Soekarno dalam buku *Indonesia Menggugat*?

Kajian Pustaka

Adapun dalam kajian ini dibahas mengenai beberapa kajian tentang:

1. Kajian Landasan Pemikiran Ir. Soekarno dalam Buku *Indonesia Menggugat*;
2. Kajian Tentang Pandangan-pandang-an Ir. Soekarno;
3. Kajian Tentang Ilmu Politik Pemerintahan dan Kepemimpinan Ir. Soekarno;
4. Kajian Tentang Ilmu Sosial dan Keteladanan Ir. Soekarno.

Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian: Penelitian Kepustakaan.
2. Metode Kajian: Studi Kepustakaan (*library research*)
3. Sumber Data: Primer : Buku Ir. Soekarno: *Indonesia Menggugat* dan Sekunder: Anti kolonialisme dan Anti-Elitisme Soekarno Muda serta Dhiana Shopa Aksi dan Reaksi Soekarno maupun jurnal
4. Teknik Pengumpulan Kajian: buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
5. Teknik Analisis Kajian: Deskriptif Analitik

Pembahasan

1. Pemikiran Ir. Soekarno Era Pra Kolonial dan Kolonialisme, secara garis besar tentang ide dan gagasan revolusioner, dan pemikiran lainnya dalam melawan era kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda;
2. Anomali-anomali Ir. Soekarno Konteks Politik Ketatanegaraan Indonesia, secara garis besar dibahas mengenai kontroversi Belanda dalam menangkap Ir. Soekarno dan penyimpangan-penyimpangan serta penindasan lainnya;
3. Pandangan Ideologi dan Politik Ir. Soekarno Konteks Kenegaraan dan Pemerintahan, kaitannya dengan pemikiran ideologi negara dan politik kenegaraan Ir. Soekarno;
4. Pandangan Pancasila dan Sosialisme Ir. Soekarno Konteks Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat, pada pokok bahasan ini dibahas beberapa Pandangan Pancasila dalam kaitan sosial ketatanegaraan Ir. Soekarno era Kolonialisme dan Imperialisme. Selain itu dibahas juga prinsip Marhainisme pada tataran Sosio-Nasionalisme Ir. Soekarno pada masa pemerintahannya.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pandangan Politik dan Sosial Ir. Soekarno dalam Buku *Indonesia Menggugat*.

1.a Pemikiran Ir. Soekarno Era Pra Kolonial dan Kolonialisme.

1.a.1 Pemikiran Revolusioner Ir. Soekarno.

Pemikiran tentang Revolusi Soekarno merupakan ide-ide gagasan dan gerakan untuk mengadakan perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya yang di dasarkan pada asaz perjuangan. pemikiran itu dituangkan dalam konstitusi dan terimplementasi dalam gerakan-gerakan revolusi. Seperti halnya perumusan Pancasila, kembali kepada NKRI tahun 1950, penerapan sistem demokrasi terpimpin tahun 1959, ekonomi terpimpin, serta Manipol Usdek sebagai intisari dalam revolusi Indonesia (Depen, 1959:358). Pola pemikiran serta pembelajaran Soekarno lebih condong kearah perpolitikan ketimbang harus melaksanakan formalitas di lembaga pendidikan Belanda (Adams, 2011:46).

Awal melakukan revolusi kemerdekaan Indonesia sebenarnya digagas oleh Soekarno mulai jaman pergerakan 1926. Salah satu bentuk gerakannya bertujuan mempersatukan elemen masyarakat Indonesia yang dominan dalam arah perjuangan melawan penjajah. Elemen masyarakat itu tidak lain adalah Nasionalis, Islamis serta Marxis. Soekarno menggagas persatuan dan kesatuan pada setiap visi dan misi tiga elemen tersebut serta menarik benang merah terkait proses perjuangan yang memiliki kesamaan tujuan. Harapannya akan menjadi sebuah api gelombang revolusi yang besar jika ketiga elemen ini bersatu (Soekarno, 1963:11-22)

Konsep pemikiran Soekarno dilatar belakangi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi serta budaya masyarakat Indonesia. Kesengsaraan dibidang itulah Soekarno meramu pemikiran dengan terobosan-terobosan ide-ide revolusi.

Faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir Soekarno, sebab selama belajar di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, dan tempat baru inilah Soekarno mendapat kasih sayang baru dari ketua organisasi Sarekat Islam, dan mendapat pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki siswa pada umumnya. Tamu-tamu penting di rumah H.O.S Cokroaminoto sering dijumpai Soekarno, maka tak heran sekali pendidikan politik Soekarno lebih dulu dibandingkn yng lainnya. Soekarno mengakui banyak yang ditiru dari ketua sarikat islam (Adams, 2011:41-46).

Irasional Soekarno dibumbui kehidupan supranatural yang lambat laun menghilang ketika muncul kemahiran dalam berpidato, kepribadian yang secara mendasar terbentuk karena lapisan masyarakat budaya. Setelah mengalami perkembangan yang sangat cepat, Soekarno kemudian pindah sekolah ke *Europeese Lagere School* (ELS) di Mojokerto dan turun ke kelas lima. Disamping belajar di sekolah itu, Soekarno juga mengambil "les" pelajaran bahasa Perancis di *brynette de la Roche Brune*. Setelah lulus di ELS Mojokerto, kemudian pendidikannya dilanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) Surabaya, sebenarnya sekolah ini adalah sekolah yang sangat sulit dimasuki oleh para pribumi, namun karena Soekarno mampu membayar mahal, maka Soekarno pun masuk sekolah ini dan kemudian di sekolah ini Soekarno mengenal teori marxisme dari seorang gurunya, yaitu C. Hartough yang menganut paham sosial demokrat. Ayah Soekarno mempercayakan kepada H.O.S cokroaminoto untuk menjaga Soekarno (Mufid, 2015:37-54).

Soekarno memiliki beragam konsep revolusi terbukti dengan gagasan-gagasannya di tahun sebelum kemerdekaan atau pada jaman pergerakan 1926. Konsistensi gagasan tersebut sebenarnya memiliki kesamaan tujuan revolusi, namun perbedaannya terletak didalam implemmentasi yang di pengaruhi faktor kedudukan/kekuasaan, kondisi serta situtasi mayarakat Indonesia. Dasar revolusi Soekarno adalah landanasan tuntutan budi nurani manusia (Wuryadi, 2005: 6-11). Setiap persoalan revolusi harus kembali kedaras landansan tersebut. Soekarno

menguraikan revolusi nasional dengan tujuan sosialisme Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Depen, 1959:31). Revolusi Soekarno mencakup semua sendi-sendi masyarakat sehingga sering disebut revolusi nasional, ada tiga konsep dalam revolusi Soekarno di era 1945-1967 yaitu, revolusi sosial, revolusi politik dan revolusi ekonomi.

Pada pandangan politik, Soekarno dalam sikap politik pada tahun 1945 tidak begitu ditonjolkan dikarenakan pihak sekutu barat menganggap kolaborator Jepang bahkan boneka Jepang, dan pihak sekutu dan belanda tidak menginginkan untuk membuka perundingan dengan Soekarno, karena menganggap Soekarno penjahat perang (Hidayat, 2016:78), Kembali ke dalam taktik perjuangan Soekarno, bahwa sikap politik Soekarno dalam nuansa revolusi dipengaruhi faktor social, politik dan ekonomi baik dalam negeri maupun dunia internasional. Untuk mendobrak dan membangun revolusi Soekarno harus menghilangkan kesengsaraan rakyat pada periode revolusi *investmen* sebelumnya dan menekankan nilai dan makna kemerdekaan pada masa revolusi *survival* (Depen, 1959:36).

Revolusi politik Soekarno terlihat jelas ketika Soekarno meramu alam pikirannya atas dasar tuntutan *The social conscience of man* (Wuryadi, 2005: 6-11). Tuntutan dan tekanannya bahwa politik dalam sistem ketatanegaraan maupun dalam bermasyarakat harus mengedepankan tuntutan hati nurani manusia. Secara garis besar letak revolusinya bahwa setiap hal politik dalam revolusi harus memerhatikan segi *humanity* (kemanusiaan).

1.a.2 Aktualisasi Ide dan Pemikiran Revolusioner Ir. Soekarno

Pemikiran dalam konteks ini berupa sebuah gagasan aplikatif yang Soekarno ramu menjadi aktivitas konstitusionalis bukan sebuah konsep lagi, akan tetapi sebuah gerakan revolusi yang memanfaatkan *grande elegance notch*. Adapun yang digagas adalah Pancasila dan Proklamasi.

Penekanan terhadap makna dasar negara belum diilhami dari pengertian anggota-anggota yang terlebih dulu menyampaikan dasar negara. Soekarno menekankan pentingnya dasar negara terlebih dahulu. Soekarno menyampaikan pidato anggota-anggota sebelumnya tidak menawarkan sebuah dasar negara Indonesia merdeka. Pada tataran selanjutnya yang diminta dalam sidang adalah sebuah dasar negara Indonesia Merdeka, mencari sebuah dasar yang akan diterima oleh semua kalangan. Itulah yang menjadi tujuan utama Soekarno pada tanggal 1 Juni menyampaikan pidatonya, yakni untuk menawarkan kepada semua anggota suatu sistem filsafat yang bisa diterima oleh semua pihak (Dahm, 1987:410).

Pada malam menjelang 1 Juni, Soekarno bertafakur, menjelajahi lapis demi lapis lintasan sejarah bangsa, menangkap semangat yang bergelora dalam jiwa rakyat, dan akhirnya menengadahkan tangan meminta petunjuk kepada Tuhan agar diberi jawaban yang tepat atas pertanyaan tentang dasar negara yang hendak dipergunakan untuk meletakkan Negara Indonesia Merdeka (Latif, 2012:12). Negara Indonesia merdeka dalam wadah revolusi haruslah diiletakkan di atas meja statis yang dapat mempersatukan seluruh elemen di dalam bangsa.

Pada tanggal 10 Agustus 1945 desus-desus Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (Kahin, 2013:195-196).

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah Timur Laut

Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka mengabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Proses menuju kemerdekaan RI secara tidak langsung mendapat bantuan dari tangan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan mulai dibentuknya BPUPKI, PPKI. Dalam hal ini Jepang juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mencegah kembalinya Belanda di Indonesia (Ricklefs, 2005:425).

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00-04.00 dini hari (Kahin, 2013:198). Penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia (Sumardiati, 2010:64). Teks Proklamasi itu diketik oleh Sayuti melik, Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan pegangsaan Timur 56. Telah hadir antara lain soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabranl dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, Wakil Walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik. Dengan kedaulatan ditangan rakyat yang dijalankan amanat sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari otto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional yang merupakan jelmaan panitia persiapan kemerdekaan (Sumardiati, 2010:69).

2. Anomali-anomali Ir. Soekarno Konteks Politik Ketatanegaraan Indonesia

2.a. Otoritarianisme Sistem Pemerintahan Presiden Ir. Soekarno

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR, tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah presiden. Meskipun demikian, menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden (Karim, 2003:143)

Di sini menunjukkan bahwa UUD 1945 yang menempatkan kekuasaan eksekutif sangat absolut telah disalahgunakan bahkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup pada 1963 oleh MPRS yang dipilih dirinya sendiri. Masa demokrasi terpimpin menjadi wahana bagaimana tiga kekuatan politik (Soekarno, TNI-AD, PKI) “berkolaborasi dan saling tarik-menarik kepentingan”, dengan menegaskan kekuatan politik yang lain (parpol-selain PKI) hingga mencapai klimak (titik kulminasi) dengan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI yang kemudian tidak saja mengakhiri kiprah politik Soekarno dan PKI, tetapi juga menjadi awal dari adanya pergantian kepemimpinan di level yang paling atas. Era demokrasi terpimpin pun berakhir seiring dorongan

pembaruan dan perbaikan serta harapan baru dari masyarakat atas berbagai permasalahan akut yang menimpa bangsa.

Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menyusun dan menulis sendiri pidato tersebut. Isi pidato Indonesia Menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. (Arizona, Diakses tanggal 29 Mei 2014).

Secara garis besar, berdasarkan survei *Algemeene Recherche Dienst* (ARD), sejak kaum pergerakan diberangus mulai awal 1930-an, pemerintah kolonial melakukan pengintaian terhadap aktivitas politik penduduk pribumi yang terdiri dari lima bagian: pergerakan ekstremis, gerakan Islam dan nasional, gerakan orang-orang Cina, gerakan serikat buruh, dan luar negeri.

Ketika Sukarno dan para aktivis pergerakan lainnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara, situasi Kota Bandung menjadi genting. Di hampir semua tempat umum, para polisi berjaga. Mereka seperti dituturkan Inggit Garnasih dalam Kuantar ke Gerbang (2014) yang ditulis Ramadhan K.H., berjaga di stasiun kereta api, stasiun bus, pasar, bioskop, tempat biliar, alun-alun, dan di kantor pos dekat penjara Banceuy.

Keadaan ini membuat Inggit khawatir atas yang terjadi pada suaminya. Ia buru-buru mencari kabar ke penjara Banceuy dan bertemu dengan istri Gatot Mangkupraja, namun, ia takizinkan bertemu dengan Sukarno. Ketika ia bertanya kapan ada kepastian bisa bertemu dengan suaminya, petugas hanya menjawab, "tidak tahu."

Setelah menjalani persidangan dan membacakan pembelaan, Sukarno dan kawan-kawannya divonis bersalah dan menjalani hukuman kurungan selama beberapa tahun. Mereka dipindahkan dari penjara Banceuy ke penjara Sukamiskin, bui yang hari ini menjadi rumah tahanan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

2.b. Kontroversi Pengawasan Pemerintahan Hindia Belanda Kepada Ir. Soekarno

Melalui media surat kabar, pemerintahan hindia belanda melakukan tindakan-tindakan perlawanan secara propaganda terhadap pergerakan PNI yang dipelopori Ir. Soekarno. Hal inilah membahayakan kemandirian dan ketertiban termasuk dalam keresahan masyarakat di tengah-tengah adanya pengawasan pemerintahan hindia belanda. (Legge, 1972:129)

Pada tanggal 6 Agustus 1929, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan ancaman akan membubarkan pergerakan PNI dan menangkap para tokohnya. Adapun program dari PNI tertuang dalam pasal 2 anggaran dasarnya yang tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Pada pasal 3 berisikan tentang kerjasama dengan semua organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Desember 1927, PNI berhasil menghimpun kesepakatan tentang pembentukan suatu wadah kerjasama antar mereka yang dinamai PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Garis perjuangan PNI adalah nonkooperasi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak berdiri, PNI menyelenggarakan kongres dua kali. Kongres pertama diselenggarakan di Surabaya pada 28-30 Mei 1928 dan kongres kedua di Jakarta, 18-20 Mei 1929. Dalam kongres pertama, Sukarno mengemukakan asas nasionalisme PNI ke hadapan ribuan pengikutnya, sekaligus pertemuan resmi pertama antara pemimpin partai dan konstituennya. Bahkan agen Dinas Pengawasan Politik pemerintah pun turut menyusup ke dalamnya. Dalam kongres ini, Sukarno benar-benar menjadi medan magnet bagi massa yang hadir. Seribu orang simpatisan terbuai oleh orasi Sukarno. Sang ketua PNI ini menyerukan bahwa jiwa nasional akan melahirkan tekad nasional yang akan mendorong lahirnya usaha nasional. Seruan yang diucapkan oleh Sukarno ini jelas

merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kongres yang berlangsung selama tiga hari ini, berjalan dengan lancar dan tertib. (Soekarno, 1963).

Kongres di Surabaya menghasilkan keputusan tentang perubahan nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Sukarno selaku ketua umum mempertegas tujuan partai. Berusaha mencapai kemerdekaan politik dengan jalan menghabisi riwayat penjajahan Belanda supaya dapat dimulai pekerjaan membangun negara kebangsaan. Tujuan politik yang tegas ini akan dilaksanakan dengan menggerakkan segenap kekuatan yang dimiliki rakyat. Tanpa usaha kita sendiri sangatlah mustahil pihak kolonial Belanda akan melepaskan bangsa Indonesia dari kekuasaannya. Ketegasan tujuan politik PNI dituangkan dalam program perjuangannya yang meliputi: Pertama: mengenai politik, ialah dengan jalan meneguhkan kesadaran kebangsaan, memperkokoh persatuan dan menghindarkan segala bendungan-bendungan yang menghambat kemajuan politik dan kemerdekaan diri. Kedua: melakukan pembangunan ekonomi, di dalam arti kata yang seluas-luasnya. Ketiga: membentuk susunan pengajaran kebangsaan.

Seiring dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pun semakin ketat. Para pemimpin PNI yang menggalang kekuatan tidak hanya di kalangan partai, juga meluaskan perannya dengan mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang menjadi motor berbagai pertemuan politik dan Sumpah Pemuda pada 1928. Iklim politik kembali memanas seiring kemunculan pemimpin-pemimpin politik yang baru itu. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin PNI. Pada 29 Desember 1929, Sukarno beserta Maskoen, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepradja ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri rapat umum yang diselenggarakan PPKI. (Karim, 2003)

Pada tanggal 1 Desember 1930, Sukarno mengucapkan pembelaannya di pengadilan negeri Bandung. Sukarno menegaskan bahwa PNI berusaha menyadarkan rakyat bagi terciptanya perbaikan dengan melalui berbagai kursus-kursus yang kelak akan mendatangkan Indonesia merdeka. Aktivitasnya dalam PNI tidak melanggar hukum yang dituduhkan. Pembelaannya ini dikenal oleh rakyat dengan nama "Indonesia Mengugat". Bagaimanapun usaha Sukarno yang sangat gigih ini ternyata tidak berhasil menyakinkan hakim pengadilan. Pada tanggal 22 Desember, Sukarno dan kawan-kawannya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri Bandung dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Beberapa kontroversi pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan pengawasan terhadap Ir. Soekarno pada pergerakan PNI, antara lain:

- a. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan tanpa dasar terhadap Ir. Soekarno dengan tidak memperhatikan apa keuntungan dan kerugiannya;
- b. Pemerintah Hindia Belanda tidak mempertimbangkan tujuan politik Ir. Soekarno dalam pergerakan PNI, di mana mempunyai maksud dan tujuan politik, sosial, ekonomi bahkan diplomasi;
- c. Pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan hukum yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia untuk mengembangkan diri dan mempertahankan diri, terutama pada Ir. Soekarno dalam memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

3. Pandangan Ideologi dan Politik Ir. Soekarno Konteks Kenegaraan dan Pemerintahan

Ideologi merupakan suatu gagasan tentang masa depan sekaligus gagasan tentang cita-cita. Istilah ideologi ini dikemukakan oleh filsuf Perancis yang bernama Destutt de Tracy (1754-1836) dan muncul sekitar akhir abad ke-18. (Suseno, 1992:56) Ideologi dapat dimaknai kedalam dua pengertian yakni sebagai cita-cita dan sebagai masa depan. Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, namun ideologi adalah sebuah gagasan yang

dianut oleh sekelompok manusia ataupun oleh bangsa dari suatu Negara. Ideologi merupakan alat yang menggerakkan seseorang atau sekelompok orang guna mencapai cita-citanya. Terlepas dari ideologi tersebut hanya sebuah mimpi atau utopia namun penekanannya adalah ideologi merupakan gagasan ilmiah rasional yang bertolak dari analisis masa kini.

Salah satu pemikiran seseorang yang menjelma menjadi sebuah ideologi adalah pemikiran dari Sukarno. Ideologi hasil pemikiran Sukarno yang menjadi penggerak bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita masa depannya, yakni Marhaenisme. Sebagai sebuah dasar gerakan politik yang memuat konsep masyarakat yang dikehendaki, maka marhaenisme sudah memenuhi syarat untuk disamakan dengan sebuah ideologi. Sebagai ideologi, maka marhaenisme tidak akan terlepas dari kecenderungan-kecenderungan ideologi lain yang lebih dulu ada. Marhaenisme sebagai ideologi yang progresif merupakan sebuah counter ideologi terhadap ideologi reaksioner yang direpresentasikan oleh imperialisme Belanda di Indonesia.

Cita-cita marhaenisme bukan hanya sekedar untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi yang lebih penting lagi adalah marhaenisme berjuang untuk kesejahteraan rakyat khususnya kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme juga berusaha meniadakan sistem yang menindas kaum marhaen itu sendiri contohnya adalah sistem kapitalisme, baik kapitalisme asing maupun kapitalisme bangsa sendiri. Cita-cita ini didasarkan pada kepercayaan marhaenisme, bahwa kapitalisme adalah penyebab kesengsaraan, kemiskinan, peperangan dan rusaknya susunan dunia. (Wibowo, 2005:61)

Marhaenisme bertitik tolak dari nasionalisme yang bersifat khas Indonesia yakni sosio-nasionalisme yang dikaitkan dengan perikemanusiaan, dimaksudkan untuk menghindari penindasan antar bangsa dan penindasan di dalam bangsa. Sosio-nasionalisme tersebut mendorong sosio-demokrasi yakni demokratisasi yang berkaitan dengan usaha penegakan keadilan sosial. (Kaligis, 2014:312)

Marhaenisme disyaratkan menjadi pembebas dan penebus segala kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh kapitalisme, baik dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. Karenanya marhaenisme secara materiil harus mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara realitas sosial dengan kesadaran aktual massa serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat secara historis. Sebab jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka marhaenisme akan terjebak menjadi suatu pemahaman yang tidak ilmiah, sekedar kesadaran palsu dan tidak tertutup kemungkinan menjadi klaim-klaim pembenar kekuasaan.

Segi historis memperlihatkan bahwa ikhtisar marhaenisme telah ada sebagai penggerak dalam dinamika Pergerakan Nasional. Salah satu bagian pergerakan nasional tersebut adalah organisasi partai politik, salah satunya adalah PNI era 1927 yang didirikan Sukarno. Saat itu PNI 1927 belum menganut asas marhaenisme, melainkan kemerdekaan, persatuan dan solidaritas Indonesia, non-kooperasi serta *self-help*, karena marhaenisme baru pertama kali dinyatakan secara tertulis pada tahun 1930. Pada tataran prinsipal bahwa asas yang dipakai PNI 1927 pada intinya tidak berbeda dengan marhaenisme dan asas tersebut merupakan komponen pendukung lahirnya marhaenisme.

Konstelasi politik yang ada sekitar tahun 1930-1931 menghadirkan realita bahwa PNI pada saat itu lesu seiring dengan vonis yang dijatuhkan pengadilan kolonial Bandung pada Sukarno. Ia dijerat pasal 169 Kitab hukum Pidana Kolonial yang berbunyi "*barang siapa ikut dengan perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, dan barang siapa ikut dengan suatu perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran atau dengan perkumpulan lain yang dilarang peraturan umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.*" (Daradjati, 2014:2). Seiring dengan vonis tersebut, akhirnya pada tanggal 25 April 1931 PNI dinyatakan bubar.

Teks pembelaan “Indonesia Menggugat” menjadi dokumen penting berkelaas dunia, sebagai bagian dari sejarah penentangan kolonialisme dan imperialisme. Soekarno menggambarkan secara terperinci penderitaan rakyat sebagai penghisapan tiga setengah abad oleh penjajahan Belanda. Tesis tentang kolonialisme itu, kemudian diterbitkan dalam selusin bahasa di beberapa negara.

Berikut adalah sekelumit pembelaan Soekarno di Jalan Landraad, yang ia ucapkan dengan suara menggelegar, meledak-ledak, menunjukkan besarnya nyali “*musuh nomor satu*” Belanda. *Pergerakan tentu lahir. Toh diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka! Djangan lagi manusia, djangan lagi bangsa, walau tjatjing pun tentu bergerak berkuleget-kuleget kalau merasakan sakit!*”

Ir. Soekarno membacakan naskah “Indonesia Menggugat”, suasana hening. Tidak satu pun yang hadir bersuara. Meskipun demikian, suasana persidangan sangat gegap-gempita. Ruang sidang penuh manusia. Halaman gedung pengadilan penuh manusia. Pada saat Bung Karno bersuara, semua diam, suasana senyap. Tiada gemerisik suara. Selain gelegar Bung Karno, yang terdengar hanya suara putaran lembut dari kipas angin di atas kepala yang terdengar merintih.

Sukarno punya jawabannya. Dalam pidato pembelannya di depan Pengadilan Kolonial tahun 1930, Indonesia Menggugat, Sukarno memberkan empat cara Belanda menancapkan kuku kolonialisme dan imperialismenya di bumi Indonesia. Pertama, sistem imperialisme melahirkan politik *divide et impera*, yakni politik memecah-belah. Menurut Soekarno, imperialisme di mana saja, apapun bentuknya, punya slogan yang sama: “*Verdeel en heers*” pecahkan dan kuasai! Dengan menggunakan mantra itu, kolonialisme bisa membangun kekuasaan di negara lain.

Itu pula yang terjadi di Indonesia. Negeri yang luasnya 60 kali luas Belanda ini bisa ditaklukkan sampai ratusan tahun. Tentu saja, kata Soekarno, senjata pamungkas belanda terletak pada politik “*divide et impera*”. Ada banyak cara untuk menjalankan politik adu domba ini: menggunakan media massa untuk meniupkan perpecahan. Di sini, pers-pers Belanda selalu merendahkan, bahkan melemahkan, setiap upaya kebangkitan nasionalisme kaum inlander (bumiputra); menjalankan politik “*eilandgouvernementen*” pemerintahan sepulau-sepulau dengan memecah belah administrasi pemerintahan; hingga menggunakan agama untuk memicu perpecahan dan pertikaian antar pemeluk agama di nusantara.

Kedua, membuat Indonesia menjadi bangsa terbelakang, terutama dalam hal pengetahuan dan kebudayaannya. Caranya, salah satunya, adalah penghancuran fikiran-fikiran (akal budi) rakyat. Politik kolonial mengubah rakyat Indonesia menjadi rakyat kecil, “*nrima*”, rendah pengetahuannya, lembek kemauannya, sedikit nafsu-nafsunya, hilang keberaniannya. Pendek kata, kolonialisme mengubah rakyat Indonesia menjadi (maaf) “*rakyat kambing yang bodoh dan mati energinya*”. Pemikir Perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, juga menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat. Akibatnya, rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual dan moral.

Ketiga, menanamkan mentalitas inferior (*inferiority complex*) alias mental inlander di kalangan rakyat pribumi. Dengan begitu, rakyat Pribumi akan selalu merasa rendah diri dan takluk di hadapan Tuan penjajah, tetapi penaklukan mental itu butuh pembenaran ideologis. Karena itu, kata Sukarno, kolonialisme di mana pun akan selalu berusaha menutupi maksudnya, bahkan menciptakan teori manis untuk mencapai tujuan mereka. Tidak jarang, misalnya, kita menemukan literatur yang menyebutkan bahwa misi kolonialisme adalah “*misi suci*” (*mission sacree*): penyebaran agama, menyebarkan

pencerahan, dan membuat rakyat jajahan menjadi “beradab”. Tidak jarang, dalam upaya menanamkan superioritasnya, pihak kolonialis melegitimasi keunggulan-keunggulan rasial: kulit putih lebih unggul dari kulit berwarna. Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, kita sering mendengar bagaimana cacian “inlander” disepadankan dengan makian “anjing”, “kerbau”, dan lain-lain.

Seperti diakui Sukarno, rakyat Indonesia dicecoki dengan anggapan “inlander bodoh”. Dengan cekokan itu, yang berlangsung secara turun-temurun, rakyat jajahan kehilangan kepercayaan diri dan kebanggaannya. Keempat, imperialis selalu berusaha menyakinkan rakyat jajahan bahwa ada persamaan kepentingan antara mereka dan rakyat jajahan. Untuk mengikat hati rakyat jajahan, mereka biasanya menyerukan perlunya “asosiasi politik”, seperti dulu ada asosiasi Uni Indonesia-Belanda.

Di lapangan ekonomi, kaum imperialis selalu berpropaganda bahwa kehadiran mereka membawa keuntungan, seperti adanya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Mereka juga berpropaganda bahwa penanaman modal asing, yang notabene satu bentuk imperialisme modern, sangat menguntungkan negara jajahan. Sebab, penanaman modal asing menghasilkan pembangunan, pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Sukarno mengajukan empat strategi kontra-imperialisme, yakni: *Pertama*, menjalankan politik kontra pecah belah. Tentu saja, politik kontra pecah belah itu adalah persatuan. Sukarno menyadari hal itu sejak pertamakali terjun ke gelanggang pergerakan. Pada tahun 1926, setahun sebelum pendirian PNI, Sukarno sudah merumuskan konsep persatuan seluruh pergerakan rakyat anti-kolonial melalui tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”.

Risalah itu, yang diperkuat dengan teori dan data, berusaha membujuk tiga kekuatan utama dalam pergerakan saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, untuk bersatu. Bahwa persatuan bukan hanya keharusan, tetapi satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. “Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,”

Sukarno tidak hanya piawai berteori, tetapi juga berjibaku membumikannya ke dalam praktek. Tahun 1927, dia menjadi tokoh penting pembentukan front persatuan bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). *Kedua*, menjalankan politik penyadaran dan edukasi. Untuk ini, Sukarno menyokong berdirinya sekolah-sekolah rakyat dan gerakan pemberantasan buta-huruf.

Di PNI, Sukarno aktif menggelar kursus politik massal. Dia juga mendirikan koran partai sebagai corong untuk berbicara pada rakyat banyak. Dalam banyak tulisan-tulisan maupun pidatonya, Sukarno kerap bicara tentang massa yang tidak sadar (*onbewust*) dan massa tercerahkan (*bewust*). Tugas partai revolusioner, kata dia, adalah membuat rakyat yang masih *onbewust* menjadi *bewust*.

Dia juga membedakan antara *massale actie* (massal aksi) dan *massa actie* (massa aksi). Massal aksi adalah pergerakan yang melibatkan massa sangat besar, tetapi tidak radikal dan revolusioner. Sedangkan massa aksi adalah pergerakan yang berisikan massa yang radikal dan revolusioner. *Ketiga*, membat habis mental inferior atau perasaan rendah diri di hadapan bangsa penjajah. Senjatanya adalah membangun rasa percaya atas kemampuan sendiri (*self-reliance*) dan semangat berdikari (*self help*). Dua hal itu pula jadi azas PNI.

Rasa percaya diri bisa dibangun melalui massa aksi dan *machtvorming* (pembangunan kekuatan). Sarananya bisa beragam, dari aksi massa, rapat akbar (*vergadering*), aksi mogok hingga mencoblos dalam pemilu. Semua itu secara politik bisa menyadarkan massa rakyat akan potensi kekuatan dan kemampuan politiknya. Di lapangan ekonomi, semangat berdikari bisa dimulai dari koperasi. Koperasi merupakan

perhimpunan ekonomi secara usaha kecil atau rakyat jelata berdasarkan prinsip kerjasama, solidaritas, tolong-menolong dan kolektivisme.

Perjuangan membat mental inferior ini bukan perjuangan gampang dan singkat. Sekalipun kemerdekaan secara politik sudah diraih, belum tentu mentalitas inferior itu menghilang. Makanya, setelah Indonesia merdeka, Sukarno punya proyek “nation building” untuk menciptakan manusia baru Indonesia. *Keempat*, menentang segala bentuk “asosiasi-politik” antara bangsa terjajah dengan imperialis. Caranya, kaum pergerakan menunjukkan pertentangan kepentingan yang tidak bisa didamaikan antara bangsa terjajah dengan imperialis. Sukarno menggunakan istilah “kaum sini” untuk bangsa terjajah dan “kaum sana” untuk penjajah.

Dalam pergerakannya, Sukarno menempuh jalan non-koperasi, yang menolak bergandengan tangan dengan penjajah. Non-koperasi menolak tawar-menawar dengan penjajah. Pada praktek dan tujuannya, non-koperasi menghendaki pengebolan secara radikal dan revolusioner. Sukarno juga menolak negara setengah-merdeka, layaknya negara-negara bekas jajahan Inggris yang bersatu secara sukarela di bawah persemakmuran Inggris. Karena itu, Sukarno menentang habis-habisan bentuk konfederasi Uni Indonesia-Belanda (1950-1956).

4. Pandangan Pancasila dan Sosialisme Ir. Soekarno Konteks Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat

Seperti dikatakan (Nagel 1994:9), ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.

Dalam kaitannya dengan lingkup kedaulatan, gagasan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan. Misalnya seberapa besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik di lapangan legislatif maupun eksekutif (*the administration of law*). jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*), melalui analisis relasional (*relational analysis*) antara ‘*sovereign*’ dan ‘*subject*’, terkait soal siapa atau apa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan siapa atau apa yang menjadi objek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tinggi. (Asshiddiqie, 1994:9)

Konsep mengenai jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*). Menurut Nagel Ada dua hal penting, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Menyangkut siapa atau apa yang menguasai, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok, sesuatu badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan. (Asshiddiqie, 1994:10)

Bung Karno misalnya mengemukakan bahwa konsep kedaulatan rakyat Indonesia itu adalah: “...Demokrasi atau kedaulatan rakyat yang mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian Indonesia, satu corak yang dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Hal ini dimaksudkan demokrasi Indonesia demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu “identik” artinya sama demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. (Pamoe Rahardjo & Islah Gusmian, 2002:187)

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie munculnya gagasan kedaulatan rakyat dalam suasana perjuangan ini sesungguhnya mendapat dorongan kuat dari semangat anti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kritik dan kecaman terhadap ketiga aliran ini sangat menonjol ketika itu. baik dalam pidato Bung Karno. (Asshiddiqie, 1994:29)

Berdasarkan pandangan dari sejumlah *the founding fathers* tersebut di atas terkait dengan gagasan kedaulatan rakyat yang akan diterapkan di Indonesia yakni kedaulatan rakyat yang berpijak pada prinsip kolektivisme menekankan pada musyawarah mufakat. Oleh karena itu dalam pembentukan regulasi negara terkait dengan pengejawantahan ajaran kedaulatan rakyat harus diukur melalui sila ke-4 Pancasila. meskipun secara institusional belum lembaga yang dapat mengukur apakah suatu produk hukum yang lahir itu sudah sesuai dengan semangat yang terkandung dalam filsafat Pancasila. Karena dalam konstruksi berpikir yang Pancasila, apabila pembukaan UUD 1945 terletak filsafat hukum Indonesia, maka Pasal-Pasal dalam UUD 1945 terdapat teori hukumnya.

Dikatakan demikian karena dalam Pasal-Pasal UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), maka bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujinya adalah Pancasila sebagai sumber tertib hukum, yang kemudian kongkretisasinya tertuang dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Pada tataran inilah, maka Pancasila pada era Soekarno menekankan pada aspek Marheanisme dengan cara membentuk perjuangan dan pergerakan dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bung Karno. Oleh karena itulah Pancasila dimaknai sebagai aktualisasi dari nilai-nilai persatuan bangsa yang berdasarkan atas sosialisme, nasionalisme, demokrasi dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Pada tataran lainnya, ajaran sosio-nasionalisme mulai muncul tahun 1930-an. Pada saat itu, sudah muncul banyak gerakan nasionalis. Paling banyak adalah nasionalis radikal: Tjipto Mangkusumo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain.

Ada dua ajaran yang sangat berpengaruh pada kelahiran sosio-nasionalisme: Pertama, ajaran nasionalisme yang berkembang di Tiongkok dan India. Bung Karno banyak mempelajari ajaran nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut. Kita tahu, ajaran nasionalisme di kedua negara itu sangat progressif, anti-kolonialisme, dan humanistik. Indonesia tentu sering mendengar kata-kata Mahatma Gandhi: *My nationalism is humanity*. Bagi Gandhi, menjadi patriotik nasionalis adalah karena kita manusia dan mencintai kemanusiaan.

Gandhi mengajarkan bentuk nasionalisme yang lain: nasionalisme yang hendak mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Kata Gandhi, jalan nasionalisme India bukanlah melayani kepicikan, egoisme, kebangsaan sempit, dan chauvinis. Sebaliknya, nasionalisme India hendak melayani kemanusiaan.

Indonesia juga mengenal nasionalis progressif dari dataran Tiongkok, Sun Yat Sen. Ajarannya sangat terkenal: *San-min Chu-i* (tiga prinsip Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di tangan Sun Yan Set, cita-cita nasional Tiongkok hendak menggabungkan tiga ajaran besar itu. Kedua, ajaran marxisme. Bung Karno sangat terpengaruhi oleh marxisme. Ia bahkan mengaku sebagai seorang marxis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan teori paling kompeten dalam memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakatan.

Ir. Soekarno sendiri pernah bilang, "Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulah yang membuat saya dari dulu benci fasisme." Marxisme mempengaruhi analisa Bung Karno soal kolonialisme. Ia tak melihat kolonialisme dari aspek rasialis: Suku, Agama, dan Ras. Karena itu, nasionalisme Soekarno, karena dipengaruhi oleh marxisme, tak punya kecenderungan sedikit pun untuk rasialis dan fasistik.

Ir. Soekarno melihat kolonialisme, juga imperialisme, sebagai bentuk-bentuk akumulasi dari kapitalisme. Dalam pidato pembelaannya, *Indonesia Menggugat*, ia mengatakan, nafsu akumulasi kapitalisme telah mendorongnya merampas negeri-negeri

lain dan mengubahnya menjadi jajahan; dan dari situ mereka mengambil bekal industri, mendorong daerah-daerah pasar bagi hasil industrinya, dan menciptakan lapangan baru bagi Bergeraknya modal mereka, namun, marxisme mempengaruhi Bung Karno sangat jauh. Ia menyadari, menghilangkan kolonialisme tanpa menghilangkan kapitalisme sama saja dengan omong-kosong. Itu sama dengan anekdot: keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya.

Oleh karena itu, perjuangan pokok bangsa Indonesia tidaklah sekedar anti-kolonialisme, tetapi harus mengarah pada anti-kapitalisme. Ia tidak hanya melawan kapitalisme bangsa lain, tetapi juga harus mencegah kapitalisme bangsa sendiri. Ir. Soekarno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.

Karena itu, kata Bung Karno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme kaum marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Inilah tipe nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa kelas”. Sebagai konsekuensinya, sosio-nasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan sebagai tujuan akhir. Bung Karno berulang-kali menyatakan kemerdekaan hanya sebagai “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam tulisannya, “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menegaskan bahwa tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Berarti, tidak boleh ada imperialisme dan kapitalisme. Untuk itu, supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik Indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Inilah esensi dari sosio-demokrasi.

Bung Karno kuat-kuat berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang *kena getahnya*, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang *memakan nangjanya*.” Karena sosio-nasionalisme bervisi “*social conscience of man*” (budi nurani sosial manusia), maka semangat sosio-nasionalisme adalah internasionalisme. Dalam pidato 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan hubungan dialektik antara nasionalisme Indonesia dan internasionalisme: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, apabila tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

Dengan demikian, sosio-nasionalisme bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) sosio-nasionalisme merupakan ajaran politik yang memperjuangkan masyarakat tanpa kelas *alias* masyarakat adil dan makmur. (2) sosio-nasionalisme memberi kerangka pada revolusi Indonesia agar tak berhenti pada revolusi nasional semata, tetapi harus berlanjut pada transisi menuju sosialisme. (3) Sosio-nasionalisme meletakkan semangat kebangsaan negeri terjajah berjalan seiring dengan cita-cita internasionalisme.

F. SIMPULAN

Menelusuri Pandangan Ir. Soekarno terhadap pandangan politik dan sosial dalam buku Indonesia Menggugat, telah mengingatkan pada nilai sejarah bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat era kolonialisme dan imperialisme. Konsep perpolitikan Ir. Soekarno terletak pada penerapan strategi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme yakni *divide at impera* (*Politik Adu Domba*). Hal inilah dianggap strategi yang sangat baik diterapkan untuk memecah belah suatu kondisi dan dinamika perang melawan kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda sebagaimana dalam buku Indonesia Menggugat.

Pada tataran sosialisme, maka Ir. Soekarno menerapkan adanya prinsip Marhaenisme, di mana menekankan pada aspek Sosio-Nasionalisme. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa senasib sepenanggungan dalam suatu kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme di era Hindia Belanda. Selain itu juga Ir. Soekarno memberikan pemahaman dan pemikirannya dalam kerangka untuk menentang penindasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta harus disesuaikan dengan kultur (budaya) Indonesia yang sangat pluralistik (beragam).

Dampak perjuangan politik Ir. Soekarno, ternyata telah mengakibatkan Kolonial Belanda akan terancam kedudukannya oleh pergerakan PNI. Kemudian Ir. Soekarno ditangkap dan diajukan kepersidangan di Bandung *Landaard*. Ir. Soekarno melakukan pembelaan yang dikenal dengan *Indonesia Menggugat* lewat tulisannya, namun usahanya sia-sia, karena hakim tetap memutuskan Ir. Soekarno dimasukkan dalam penjara karena aktivitas politiknya dan dianggap membahayakan sistem pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (Eds). (2011). *Bung karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (5th ed.)*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Al-Rahab, A. (2014). *Ekonomi Berdikari Soekarno*. Depok : Komunitas Bambu.
- Angkowo R. dan A. Kosasih. 2007. *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Grasindo. Jakarta.
- Arif S. Sadiman, dkk. 1990. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Rajawali. Jakarta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian.*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Media Pembelajaran*, edisi 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azhar Arsyad, 2003, *Media Pembelajaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basri, H. (2013). “*Pemikiran Soekarno Tentang Persatuan Indonesia Tahun 1926-1965*”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jember: Universitas Jember.
- Chatib, Munif. 2011. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Mizan Pustaka. Bandung.
- Daradjati. *Mr.Sartono : Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2014).
- Departemen Penerangan. (1959). *Haluan Politik dan Pembangunan Negara*. Djakarta: Departemen Penerangan RI.
- Departemen Penerangan. (1959). *Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Djakarta: Departemen Penerangan RI.
- Fuad Ihsan, 2001, *Dasar-dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gottschalk, L. (Ed). (2015). *Mengerti Sejarah (2th ed.)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-pres).
- Hayati, Sri. 2017. *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning*. Graha Cendekia. Jakarta.
- Hidayat, N. (2016). “*Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1946-1962*”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jember: Universitas Jember
- Huda, M. 2013. *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. Pustaka Pelajar. Malang.
- Isjoni, 2010, *Cooperative Learning*, Alfabeta, Bandung.
- Jack H Nagel dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ichtiar Van Hoeve, 1994
- John D. Legge, 1972, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Jusuf Syarif Badudu, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: TP.
- Kahin, G.M. (Ed). (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (2th ed.)*. Depok: Komunitas Bambu

- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- M. Rusli Karim, 2003, "*Perjalanan Partai Politik Di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut*", Ctk 3, Jakarta; Rajawali Press.
- Menurut Franz Magnis Suseno, 1992 dalam buku karangan Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005)
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 1997, *Media Pengajaran*, CV Sinar Baru, Bandung.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. 2003. *Media Pengajaran*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Pamoe Rahardjo & Islah Gusmian (Penyunting), *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Rahman, A dan Prabowo, A.P. (2013). *Das Capital For Beginners*. Yogyakarta: NARASI
- Retor A.W. Kaligis, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*, (Tangerang : Margin Kiri, 2014)
- Ricklefs, M.C. (Eds). (2014). *Sejarah Indonesia Modern (5th ed.)*. Jakarta : Serambi.
- Romadhoni, S. (2014). "*Sistem Dan Konstelasi Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966*". Tidak diterbitkan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jember: Universitas Jember.
- Rudi Susilana dan Cepi Riyana, 2007, *Media Pembelajaran*, Wahana Prima, Bandung.
- Sadiman, Arief S. dkk. 2005. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Pustekom Dikbud dan Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sagala, Syaiful., 2011, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Alfabeta. Bandung.
- Sjamsudin, N. (Ed).. (1988). *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : CV. Rajawali
- Soekarno. (1959). *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Soekarno. (1963). *Dibawah Bendera Revolusi (1vol.) (2th ed)*. Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Soekarno. (1963). *Genta Suara Revolusi Indonesia*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I
- Sugiyanto. 2009. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 13
- Susilana, Rudi & Riyana, Cepti, 2009, *Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penilaian*, Wacana Prima, Bandung.
- Yance Arizona. "*Indonesia Menggugat*". https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Menggugat#:~:text=Indonesia%20Menggugat%20adalah%20pidato%20pembelaan,ditudu h%20hendak%20menggulingkan%20kekuasaan%20., Hindia Diakses tanggal 29 Mei 2014.
- Yudhi Munadi, 2012, *Media Pembelajaran*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005)